



LAPORAN
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP) 2020

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 di susun berdasarkan sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga disertakan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronasi serta kinerja dari seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tanjung Selor, Februari 2021

**Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman**



H. Sudjadi, ST., MT
Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19700522 199803 1 005



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
a. Gambaran Umum SKPD	2
b. Tugas Pokok dan Fungsi	2
c. Sumber Daya Organisasi	12
d. Isu Strategis dan Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi	14
e. Sistematika penyajian laporan kinerja	16
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	18
a. Strategi dan Kebijakan	18
1. Visi.....	18
2. Misi.....	21
3. Tujuan	22
4. Sasaran	22
5. Strategi untuk Mencapai Tujuan	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
a. Akuntabilitas Kinerja	40
b. Capaian-Capaian di Perjanjian Kinerja	45
b.1 Capaian Indikator Kinerja	45
b.2 Capaian Program dan Kegiatan.....	70
BAB IV PENUTUP	93
a. Kesimpulan	93
b. Hasil Analisis Berupa Permasalahan yang dihadapi Tahun 2020.....	93
c. Langkah-langkah yang Akan di Lakukan di tahun Berikutnya untuk Mengatasi Hambatan	94
LAMPIRAN	



Daftar Tabel

Tabel 1. Data Jumlah PNS di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020	12
Tabel 2. Data Jumlah PTT di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020	13
Tabel 3. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	24
Tabel 4. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	26
Tabel 5. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020	40
Tabel 6. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020	42
Tabel 7. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018-2020	44
Tabel 8. Indikator Kinerja dari Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah tahun 2020	45
Tabel 9. Perbandingan Indikator Kinerja dari Persentase Ketersediaan Prasaran Pemerintahan Tahun 2016-2020	46
Tabel 10. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman tahun 2020	48
Tabel 11 Perbandingan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Baik Tahun 2016-2020	49
Tabel 12. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah tahun 2020	50
Tabel 13. Perbandingan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah tahun 2016-2020	51
Tabel 14. Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi tahun 2020 ..	52
Tabel 15. Perbandingan Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi tahun 2016- 2020	52
Tabel 16. Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi tahun 2020	53
Tabel 17. Perbandingan Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi tahun 2016-2020	53



Tabel 18. Capaian Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya tahun 2020	55
Tabel 19. Perbandingan Capaian Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya tahun 2016-2020	55
Tabel 20. Capaian Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya tahun 2020	56
Tabel 21. Perbandingan Capaian Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya tahun 2016-2020	57
Tabel 22. Capaian Program Pengendalian Banjir tahun 2020	58
Tabel 23. Perbandingan Capaian Program Pengendalian Banjir tahun 2016-2020	58
Tabel 24. Capaian Program Pengembangan Perumahan tahun 2020	59
Tabel 25. Perbandingan Capaian Program Pengembangan Perumahan Tahun 2016- 2020	59
Tabel 26. Capaian Program Lingkungan Sehat Perumahan tahun 2020	60
Tabel 27. Perbandingan Capaian Program Lingkungan Sehat Perumahan Tahun 2016- 2020	62
Tabel 28. Capaian Program Perencanaan Tata Ruang Tahun 2020	62
Tabel 29. Perbandingan Capaian Program Perencanaan Tata Ruang Tahun 2016-2020	63
Tabel 30. Capaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang tahun 2020	63
Tabel 31. Perbandingan Capaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang tahun 2016- 2020	64
Tabel 32. Capaian Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tahun 2020	64
Tabel 33. Perbandingan Capaian Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tahun 2016-2020	64
Tabel 34. Capaian Program Pembangunan Jalan dan Jembatan tahun 2020	64
Tabel 35. Perbandingan Capaian Program Pembangunan Jalan dan Jembatan tahun 2016- 2020	66
Tabel 36. Capaian Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong tahun 2020	67
Tabel 37. Perbandingan Capaian Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong tahun 2016 2020	67
Tabel 38. Capaian Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tahun 2020	67



Tabel 39. Perbandingan Capaian Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan tahun 2016-2020..... 68

Tabel 40. Penyerapan Anggaran per Program dan Kegiatan tahun 2020 87



Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020.....	11
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020.....	37



BAB I

(LKJiP) 2020





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang memberi arah segenap Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 dapat berhasil dengan baik Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara menetapkan dengan 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang semuanya telah tercapai dengan baik walaupun terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai dengan baik.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara ini dapat berguna untuk mendukung terciptanya “*good governance*” atau pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Utara.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur di atas bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tersebut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinaasi dan pengendalian teknis di bidang sumber daya air;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang air minum;



- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang air limbah;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang drainase;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pemukiman;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang bangunan gedung;
- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungannya;
- i. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang jalan;
- j. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penataan ruang;
- k. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang jasa konstruksi;
- l. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penatan ruang;
- m. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perumahan;
- n. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kawasan permukiman;
- o. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU);
- p. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- q. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- r. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Penyelesaian masalah ganti rugi kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- s. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- t. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- u. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan



- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok, dan fungsi serta kewenangan tersebut maka disusunlah organisasi Dinas, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Jalan; dan
 - c. Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap
4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan Bangunan
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan, sanitasi dan Air Minum
5. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Seksi Irigasi, Sungai dan Rawa
 - b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan
 - c. Seksi Pantai dan Air Baku
6. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
 - c. Seksi Pertanahan
7. Bidang Jasa Konstruksi
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
 - b. Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - c. Seksi Statistik dan Pengembangan Jasa Konstruksi.
8. Bidang Perumahan
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan
 - b. Seksi Pembangunan Perumahan
 - c. Seksi Peningkatan Perumahan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
10. Kelompok Jabatan Fungsional



1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendaiikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Gubernur dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana Program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana strateegis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- c. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang–bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing–masing;
- f. Menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- g. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum berdasarkan peraturan Perundang–undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dengan instansi terkait, kabupaten/kota, provinsi, Instansi Vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- j. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;



- k. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- l. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan;

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, rencana strategis, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan aset.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. Pengkoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan dinas perindustrian dan perdagangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;



- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan dinas;
- k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang di serahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pengembangan jalan, serta pengembangan jembatan dan bangunan pelengkap. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program rencana kerja di Bidang Bina Marga;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di perencanaan jalan dan jembatan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di pengembangan jalan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di pengembangan jembatan dan bangunan pelengkap;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Bina Marga;
- f. Pengkoordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang bina marga;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Bina Marga sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Bina Marga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Bina Marga;
- j. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Bina Marga;
- k. Pelaksanaan tugas lain, di Bidang Bina Marga yang diserahkan oleh Kepala Dinas.



4. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di penataan bangunan, pengembangan perumahan dan permukiman serta penyehatan lingkungan dan air bersih. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Cipta Karya :

- a. Penyusunan program rencana kerja di Bidang Cipta karya;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyehatan lingkungan dan air bersih;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Cipta Karya;
- f. Pengkoordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Cipta Karya;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Cipta Karya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Cipta Karya;
- j. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Cipta Karya;
- k. Pelaksanaan tugas lain, di Bidang Cipta Karya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

5. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan teknis dan informasi sumber daya air, irigasi, sungai dan rawa, operasional dan pemeliharaan, serta pantai dan air baku.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program rencana kerja di Bidang Sumber Daya Air;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi, sungai dan rawa;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang operasional dan pemeliharaan;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pantai dan air baku;
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Sumber Daya Air;
- f. Pengkoordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Sumber Daya Air;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
- h. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Sumber Daya Air sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Sumber Daya Air;
- j. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Sumber Daya Air;
- k. Pelaksanaan tugas lain, di Bidang Bidang Sumber Daya Air yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

6. BIDANG TATA RUANG

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian tata ruang, pengaturan dan pembinaan tata ruang, serta jasa konstruksi.

Fungsi Bidang Tata Ruang :

- a. Penyusunan program rencana kerja di Bidang Tata Ruang;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di perencanaan dan pengendalian tata ruang;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Tata Ruang;



- e. Pengkoordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Bidang Tata Ruang;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tata Ruang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Tata Ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Tata Ruang;
- i. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Tata Ruang;
- j. Pelaksanaan tugas lain, di Bidang Tata Ruang yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

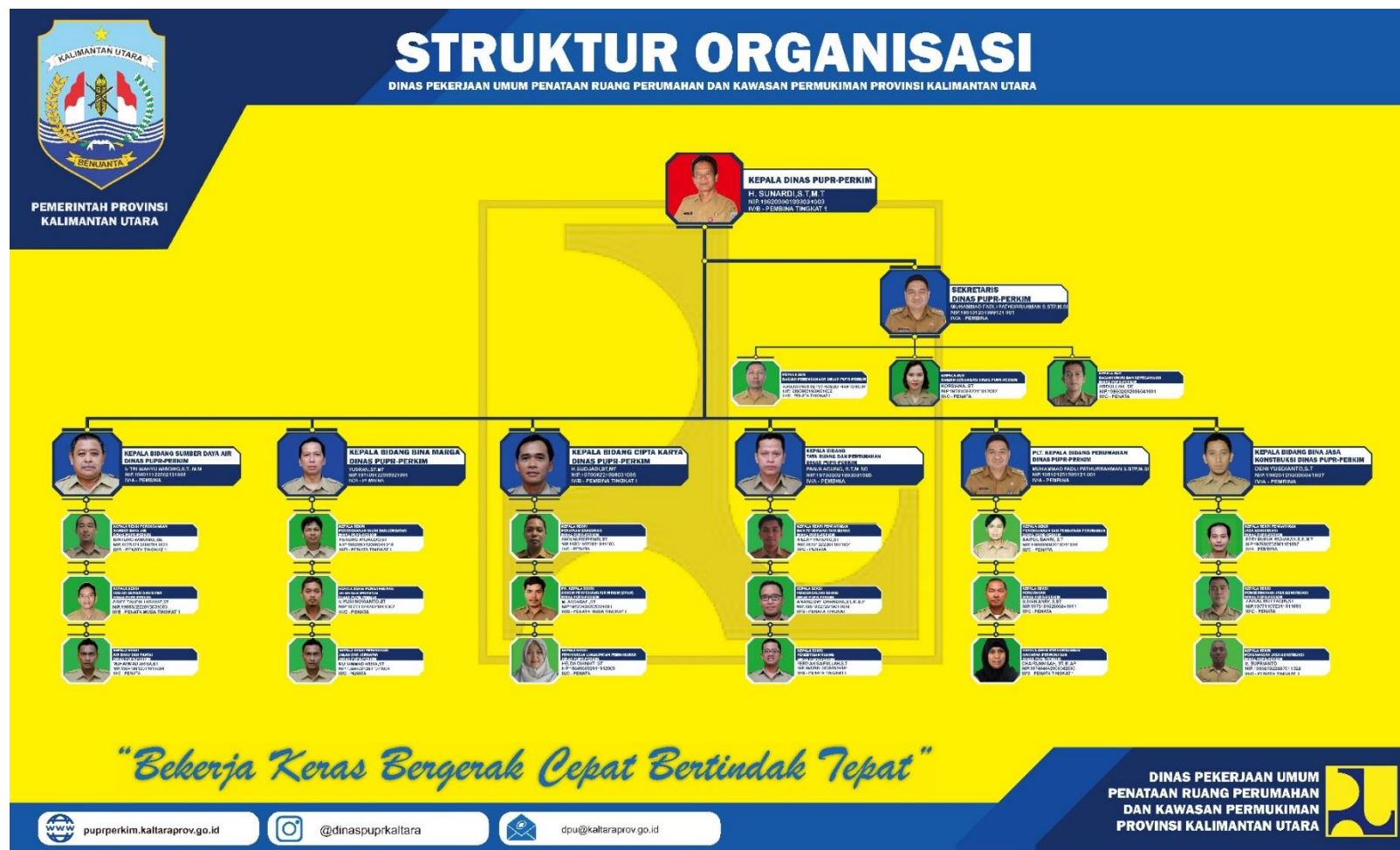
7. BIDANG JASA KONSTRUKSI

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.

Fungsi Bidang Jasa Konstruksi :

- a. Penyusunan program rencana kerja di Bidang Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan dan perumusan kebijakan Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang jasa konstruksi;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan fungsi di Bidang Jasa Konstruksi;
- e. Penyiapan bahan dan Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa Konstruksi;
- f. Pembinaan dan Pengawasan Forum Jasa Konstruksi (FJK) Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disajikan dalam gambar dihalaman berikut :





C. Sumber Daya Organisasi

Sampai dengan akhir bulan Desember 2020, jumlah seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 86 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 77 orang, dan Pegawai Kontrak sebanyak 124 orang. Secara umum data Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan golongan dan eselon adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 1 di bawah ini :

Tabel :1

Data Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemerintah provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020
Berdasarkan Golongan dan Eselon

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	GOLONGAN				ESELON				NON ESELON
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	PNS	74	-	9	55	10	-	1	6	17	50

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

Sedangkan data Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana pada Tabel 2 :



Tabel : 2

Data Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO.	BAGIAN / BIDANG				PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD/ SMP		SMA		D1		D3		DIV/S1		S2		S3				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Sekretariat	2	-	18	9	-	-	2	-	14	8	-	-	-	-	36	17	
2.	Bidang Bina Marga	-	-	5	-	-	-	-	1	15	5	-	-	-	-	20	6	
3.	Bidang Cipta Karya	-	-	3	-	-	-	-	1	8	2	1	-	-	-	12	3	
4.	Bidang Sumber Daya Air	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	1	
5.	Bidang Tata Ruang	2	-	1	-	1	-	-	-	2	5	-	-	-	-	6	5	
6	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	2	-	-	2	-	4	3	-	-	-	-	6	5	
7	Bidang Jasa Kontstruksi	-	-	1	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	2	5	
J U M L A H		4	-	28	14	1	-	5	3	49	25	1	-	-	-	88	42	

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

D. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Isu Strategis ini dibuat untuk mengetahui *existing condition* menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkini sehingga bias menjadi input dalam merumuskan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara ke depan.

1. Identifikasi Analisa Lingkungan Internal :

- a. Identifikasi Kekuatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 1. Komitmen Pimpinan beserta Seluruh Staf terhadap kegiatan pembangunan yang mempunyai arti penting bagi pembuatan kebijakan publik di Provinsi Kalimantan Utara.
 2. Jumlah dan kualifikasi SDM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
 3. Semangat kebersamaan dalam melaksanakan setiap kegiatan instansi.
 4. Jaringan hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga Pemerintah maupun Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan lembaga-lembaga Pemerintah Daerah.
- b. Identifikasi Kekuatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 1. Masih terbatasnya jumlahnya SDM.
 2. Prasarana kantor yang belum memadai.
 3. Masih terbatasnya dana dan ruang lingkup pemanfaatan anggaran.
 4. Ketersediaan sarana dan prasarana belum maksimal.

2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal :

- a. Identifikasi Peluang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 1. **Goodwill** Gubernur terhadap kegiatan pembangunan.
 2. Dukungan dana APBD Provinsi Kalimantan Utara (walaupun masih sangat terbatas).
 3. Tawaran kerjasama dengan pihak ketiga sehingga memudahkan dan memperlancar kegiatan pembangunan.
 4. Koordinasi pada sistem Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang cukup baik.
- b. Identifikasi Ancaman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatnya angka kemiskinan.
3. Rendahnya kondisi dan kualitas pelayanan, khususnya di bidang infrastruktur.
4. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia.
5. Menurunnya sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk mendukung berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan, ada beberapa persyaratan dan kelengkapan yang dibutuhkan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, diantaranya :

1. Mewujudkan infrastruktur yang handal untuk menyatukan wilayah/kawasan yang berwawasan lingkungan sebagai pendorong perekonomian masyarakat.
2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan serta tersedianya pengelolaan air baku dan pemenuhan air bersih.
3. Terciptanya kawasan permukiman yang layak dan sehat, pengelolaan sanitasi, drainase dan persampahan yang baik serta terciptanya kawasan perkantoran yang asri dan aman.
4. Terselenggaranya mekanisme perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan adalah :

1. Tersedianya dukungan dana yang memadai, yang dapat mendukung serta mengakomodir tuntutan masyarakat akan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional, yang mampu memahami serta melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai, yang mampu mendukung terlaksananya kegiatan secara baik, aman dan lancar.
4. Terjaganya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif, sehingga program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Penentuan Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara :

Strategi yang sesuai untuk Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang adalah strategi (pemantapan) **aggressive** artinya Organisasi harus mampu mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang-peluang yang ada. Organisasi juga dituntut lebih kreatif, sensitive terhadap isu-isu pembangunan dan inovatif untuk menciptakan program-program unggulan yang dapat membuka peluang-peluang yang belum sepenuhnya tergali, hal ini sangat diperlukan agar Organisasi tetap eksis dan menghadapi ancaman yang cukup besar.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat Dasar Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Sumber Daya Manusia, Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi, dan Pengantar lainnya.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhsarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, kebijakan serta program-program pembangunan, rencana kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dan Target Tahun ini.

Bab III : CAPAIAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian-pencapaian sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil analisis capaian kinerja, pencapaian kinerja lainnya, dan realisasi anggaran.



Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran-lampiran.



BAB II

(LKJiP) 2020



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Strategi dan Kebijakan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016–2021. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016–2021 dimaksudkan untuk mengarahkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Ke-PU-an yang terdiri dari Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.

1. VISI

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh.



Maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan visi, yaitu :

“Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara 2020 Yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Yang Bersih dan Berwibawa”

Visi di atas memberikan pengertian sebagai berikut :

- 1. Mandiri** : Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang Mandiri. Sebagai provinsi yang dicita-citakan mandiri, diharapkan akan mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian tidak berarti mengisolasi diri melainkan tetap memahami saling ketergantungan dengan daerah lain dalam hubungan yang saling mengisi dan bersifat proaktif. Beberapa permasalahan penting yang terkait dengan kemandirian ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan energi serta aspek pembangunan lainnya dengan penekanan pada aspek sumber daya manusia menuju Kalimantan Utara yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran diupayakan terjadi pada semua aspek kehidupan. Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.
- 2. Aman dan Damai** : bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah dengan kondisi **perpaduan kemajemukan** masyarakat yang aman dan damai untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara demografis, masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara merupakan perpaduan dari berbagai etnis baik yang merupakan

penduduk asli maupun pendatang yang pada saat ini dan masa mendatang harus bahu membahu memajukan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Kemajemukan ini haruslah diarahkan untuk menjadi potensi pembangunan yang kondusif dengan menjaga suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat dan keragaman kemampuan. Secara geografis Kalimantan Utara merupakan serambi depan bangsa yang berhadapan dengan negara lain, oleh karena itu suasana aman dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI menjadi salah satu yang penting untuk diwujudkan. Pertahanan dan keamanan NKRI merupakan urusan yang secara yuridis formil menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun Provinsi Kalimantan Utara haruslah juga berupaya menciptakan keamanan wilayah sesuai tugas dan kewenangannya karena dampak keamanan wilayah akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Demikian pula sebagai daerah yang termasuk berjarak cukup jauh dari pemerintahan pusat, penegakan hukum sesuai ketentuan juga harus diwujudkan untuk mendukung suasana aman dan damai masyarakat Kalimantan Utara.

3. **Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa** : bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel. Sebagai propinsi yang baru, Kalimantan Utara harus memulai dengan dasar yang baik, oleh karena itu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa menjadi penting untuk diwujudkan. Pemerintahan yang bersih dan kemudian berdampak pada kewibawaan menjadi upaya perwujudan pondasi dibangunnya Provinsi Kalimantan Utara yang maju dan baik di masa depan. Dimensi lain yang harus diwujudkan dalam membuat pemerintahan yang berwibawa adalah diadakannya sosok pemerintahan daerah berupa berbagai sarana dan prasarana serta kemudahan untuk melayani masyarakat Kalimantan Utara.

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan visi **Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa** yang telah ditetapkan, ada tiga misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara Yang Mandiri.
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara Yang Aman dan Damai.
3. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara Yang Bersih dan Berwibawa.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan dan daerah Otonomi Baru (DOB) yang di karuniai sumber daya alam yang melimpah. Untuk meningkatkan ekonomi dan infrastruktur wilayah, perlu dikedepankan pengelolaan dan peningkatan infrastruktur dalam menunjang kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah Provinsi yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota.

Peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sangat penting dalam rangka mendorong terselenggaranya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*), meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi utama wilayah serta meningkatnya konektivitas antar daerah dan negara tetangga.

3. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi dari suatu organisasi maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, merupakan hasil akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun, tujuan organisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi akan mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan aktivitas lembaga dalam arah semua program dan melaksanakan misinya, oleh karena itu sekaligus dapat dijadikan dasar untuk menetapkan indikator kinerja.

Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara adalah :

1. Meningkatkan ketatalaksanaan kelembagaan sesuai tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
2. Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar wilayah.
3. Meningkatnya ketahanan pangan dan sumber daya air.
4. Meningkatnya Rumah layak huni dan terjangkau.
5. Meningkatnya konektivitas daerah.

4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai.



Sasaran operasional tahunan ialah pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam perannya terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur.
2. Meningkatkan Kawasan Permukiman Yang Layak.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Jasa Konstruksi.
4. Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air.
5. Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni.
6. Peningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terkait Pentingnya RTRW.
7. Meningkatkan Kualitas dan Panjang Jalan.



Tabel : 3

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

**RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana pemerintahan	70%
2	Meningkatkan Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase luasan permukiman layak huni	30%
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Jasa Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang profesional dan bersertifikat	50%
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Rasio jaringan irigasi	15%
		Rasio wilayah rawan banjir	11%
		Persentase ketersediaan sarana prasarana air baku	12%
5	Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	32%
6	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terkait Pentingnya RTRW	Persentase masyarakat yang paham dan sadar pentingnya RTRW	45%
7	Meningkatnya Kualitas dan Panjang Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	65%

5. STRATEGI UNTUK MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari – hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Kebijakan program operasional dan kegiatan atau aktivitas organisasi mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, dengan berpedoman pada faktor kunci keberhasilan dalam perencanaan strategis yang telah disusun untuk jangka waktu lima tahun (2016-2021) :

1. Pembangunan jalan, jembatan, gedung, rumah layak huni, drainase, dan irigasi dilaksanakan dengan skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
2. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, gedung, rumah layak huni, drainase dan irigasi dilaksanakan dengan skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
3. Pemeliharaan kualitas jalan, jembatan, gedung, drainase dan irigasi dilaksanakan dengan skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
4. Memprioritaskan pengawasan dan pengendalian pekerjaan spesifikasi teknis.
5. Melakukan perencanaan teknis terpadu.
6. Pengelolaan administrasi keuangan, peralatan/perlengkapan, asset dan administrasi kepegawaian guna mendukung kelancaran operasional semua sub bag dan seksi.



1. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

Tabel : 4

Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2020	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra SKPD	
				target	Rp (Juta)
1	2		5	18	19
Meningkatkan ketatalaksanaan kelembagaan serta kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan	Terselenggaranya tugas OPD yang baik dan akuntabel	80%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	76,953
			• penyediaan jasa surat menyurat	12500 Lembar	200
			• penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	7,584
			• penyediaan jasa administrasi keuangan	60 Bulan	21,376
			• penyediaan jasa kebersihan kantor	60 Bulan	6,300
			• penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	125 Unit	1,615
			• penyediaan alat tulis kantor	60 Bulan	2,000
			• penyediaan barang cetakan dan pengadaan	60 Bulan	956
			• penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	250 Unit	200
			• penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	605 Unit	3,447
			• penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500 Eksemplar	1,045
			• penyediaan makanan dan minuman	32000 Porsi	2,280
			• rapat-rapat koordinasi	600 Kali	11,500



			dan konsultasi ke luar daerah		
			• rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	750 kali	4,850
			• Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Penyelenggaraan Pemerintah	360 Orang	13,600
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	305 Aparatur	1,500
			• Pendidikan dan pelatihan Formal	305 Aparatur	1,500
			Program Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM	85%	21,115
			• penyusunan HSPK Bidang Ke PU an	4 Kegiatan	3,093
			• Penyusunan sistem informasi DPU	8 Paket	3,400
			• Program Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an	4 Kegiatan	1,210
			• Penyusunan Sistem Informasi/data base jalan	5 Paket	5,100
			• Penyusunan Sistem Informasi/data base jembatan	3 Paket	3,000
			• Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	5 Paket	1,662
			• Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air	5 Paket	2,400
			• Penyusunan Sistem informasi pertanahan yang handal	2 Paket	1,250
Mewujudkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap Dalam Kesatuan Sistem Jaringan Jalan Provinsi Kalimantan Utara Untuk Membuka Keterisolasian	Tersedianya infrastruktur jalan dan Jembatan	45%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	45%	743,769
			• Perencanaan Pembangunan Jalan	50 Paket	27,694
			• Pembangunan Jalan	130 Paket	554,120



Daerah Perbatasan, Pedalaman, Pulau Terluar, Jalan Strategis Provinsi Yang Mendukung Pengembangan Kewilayahan dan Pusat Pemerintahan Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan		Perencanaan Pembangunan Jembatan	18 Paket	18,225
		Pembangunan Jembatan	6 Paket	143,730
	65%	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	70%	65,229
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	45 Paket	59,229
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	2 Paket	6,000
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	55%	33,046
		Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	5 Paket	5,215
		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	10 Paket	27,831
		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	90%	6,706
		Inspeksi Kondisi Jalan	10 Paket	4,580
		Inspeksi Kondisi Jembatan	10 Paket	2,126
		Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan	100%	541
		Penyusunan Sistem Informasi/data base jalan	2 Paket	541
		Penyusunan Sistem Informasi/data base jembatan		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	100%	12,359
		Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	4 Paket	4,359



Mewujudkan Kawasan Permukiman yang layak dan Berkelanjutan	Terpenuhinya sarana pemerintahan		Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	1 Paket	2,000
			Pengadaan Alat-Alat Berat	2 Paket	6,000
		87%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2,263,917
			Pembangunan Rumah Dinas	1 Paket	24,000
			Pembangunan Gedung Kantor	43 Unit	1,482,638
			Pengadaan kendaraan dinas / operasional	10 Unit	2,010
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	360 Stel	600
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	360 Stel	600
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5 Unit	1,095
			Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	264 Unit	21,458
			Pembangunan Gedung Kantor SKPD	5 Paket	118,856
			Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum	5 Unit	13,571
			Pembangunan dan Penyediaan Fasilitas Umum	10 Unit	16,000
			Pembangunan Pusat Kawasan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara	5 Paket	232,415
			Pelaksanaan Pengadaan Tanah	5 Paket	347,489
			Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	5 Paket	8,348
	Tertanganinya air limbah, Air Minum, Air Bersih dan sistem	30%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	35%	24,763



	drainase lingkungan serta persampahan		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	12 Paket	24,763
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	35%	53,432
			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	4 Paket	4,000
			Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	7 Paket	45,432
			Pembangunan Air Bersih	2 Paket	4,000
			Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PLP)	4 Paket	14,000.00
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman	4 Paket	14,000.00
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pemukiman kawasan pedesaan dan perkotaan	80%	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	460 Ha	67,800
			Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman	4 Paket	9,400
			Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	100 Ha	14,000
			Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan	100 Ha	24,400
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	50 Ha	10,000
			Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman strategis	50 Ha	10,000
Mewujudkan infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi untuk mendukung	Meningkatnya pembangunan jaringan irigasi, sungai dan rawa	15%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	45%	217,775



ketahanan pangan serta tersedianya Pengelolaan Air Baku			Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	18 Paket	10,731			
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai	21 Paket	21,000			
			Pembangunan Jaringan Irigasi	15 Paket	98,747			
			Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	4 Paket	21,175			
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4 Paket	52,000			
			O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara	4 Paket	14,122			
			Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	60%	117,840			
			Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			19 Paket	56,346.00	
			Pengelolaan Sungai di Provinsi Kalimantan Utara	14 Paket	61,494			
			11%	Program Pengendalian Banjir	100%	134,012		
			Meningkatnya sarana pengaman pantai dan bangunan pengendali banjir			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	15 paket	14,522
						Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan	2 Paket	10,000



	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air, pemukiman, dan pertanian	12%	Air dan Badan - Badan Sungai		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir	31 Paket	91,206
			Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	6 paket	18,284
			Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	100%	25,000.000
			Sarana/Prasarana Penyediaan Air Baku Yang dibangun/ditingkatkan	20 Paket	25,000.000
Mewujudkan pembangunan infrastruktur perumahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal dan kawasan perdesaan	Berkurangnya rumah tidak layak huni dan pemenuhan sarana permukiman masyarakat	32%	Program Pengembangan Perumahan	100%	105,188
			Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	5 Paket	6,619
			Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	6 Paket	18,856
			Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	43 Paket	18,463
			Pembangunan Kualitas Rumah Layak Huni	8 paket	61,250
		35%	Program lingkungan sehat perumahan	2000 Unit	30,751
			Penyediaan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	2000 Unit	28,002
			Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	1 Paket	2,749
		46%	Program pengelolaan areal pemakaman	100%	2,602



			Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	1 Paket	2,602
Terselenggaranya Mekanisme Perencanaan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang dan Mengoptimalkan Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan	Terkendalinya perencanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang	45%	Program Perencanaan Tata Ruang	100%	34,657
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	5 Paket	1,845
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	11 Paket	28,365
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	1 dokumen	501
			Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	5 Paket	1,716
			Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang	5 Paket	2,230
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100%	13,310
			Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3 Dokumen	1,500
			Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	4 Kegiatan	1,600
			Sosialisasi Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4 Kegiatan	1,600
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	5 Dokumen	3,610



			Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang	4 kegiatan	3,000
			Survey dan Pemetaan	2 kegiatan	2,000
			Program Ruang Terbuka Hijau	100%	17,042
			Sosialisasi Kebijakan Norma Standar Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH	5 kegiatan	1,799
			Pembangunan RTH	33 Paket	14,643
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH	1 kegiatan	600
	Terwujudnya Pelayanan Publik dibidang Pertanahan yang Optimal		Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	100%	5,750
			Catur tertib administrasi pertanahan	3 Kegiatan	2,250
			Monitoring dan Evaluasi	4 Kegiatan	1,500
			Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) bidang Pertanahan	1 Paket	750
			Penyusunan Sistem informasi pertanahan yang handal	2 Paket	1,250
Meningkatnya pengelolaan sektor konstruksi dan mewujudkan tatakelola proses penyelenggaraan konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara	Terselenggaranya pengelolaan sektor konstruksi dan mewujudkan tatakelola proses penyelenggaraan konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara	30%	Program Pembinaan Usaha Dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	25%	1,615
			Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) Prov. Kaltara	1 Kali	317



			• Forum Jasa Konstruksi (FJK) Prov. Kaltara		1 Kali	353
			• Koordinasi Pembentukan Dan Pengembangan LPJK Kaltara		1 Paket	945
			Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		100%	3,493
			• Penyusunan PERGUB Kalimantan Utara tentang Tenaga Kerja Konstruksi Lokal		0%	-
			• Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)		1 Paket	462
			• Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian mutu konstruksi daerah		-	-
			• Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (Instansi Pemerintah, Orang Perseorangan, Badan Usaha)		-	-
			• Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)		-	-
			• Bimbingan Teknis Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi/MTU		5 Kegiatan	1,942
			• Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Jasa Konstruksi		2 Dokumen	1,089
		50%	Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi		80%	5,740
			• Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi		5 Kali	1,750
			• Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi		4 kali	2,240



			• Forum Jasa Konstruksi (FJK) Prov. Kaltara	5 Kali	1,750
			Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi	100%	17,260
			• Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi	12 Kali	7,210
			• Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi	5 Kali	1,400
			• Pembinaan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi	8 Dokumen	6,600
			• Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi	4 Dokumen	2,050



B. Perjanjian Kinerja

Gambar : 2

Perjanjian Kinerja Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sunardi, ST., MT**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. H. Irianto Lambrie**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, 2 Maret 2020

Pihak Kedua Gubernur Kalimantan Utara,  Dr. H. IRIANTO LAMBRIE	Pihak Pertama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman,  SUNARDI, ST., MT NIP. 19620906 199303 1 003
--	--



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	70%
2	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak	Persentase luasan permukiman layak huni	30%
3	Meningkatnya kualitas sumber daya jasa konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang profesional	50%
4	Mewujudkan infrastruktur Sumber Daya Air yang berkualitas	Rasio Jaringan Irigasi	15%
		Rasio wilayah rawan banjir	11%
		Persentase Ketersediaan sarana prasarana air baku	12%
5	Meningkatkan pembangunan rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	32%
6	Meningkatnya Pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya RTRW	Persentase masyarakat yang paham dan sadar pentingnya RTRW	45%
7	Meningkatnya kualitas dan panjang jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	65%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 135.286.786.000,00	APBD
2.	Pengembangan Perumahan	Rp 31.765.500.000,00	APBD
3.	Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 292.200.000,00	APBD
4.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp 565.050.000,00	APBD
5.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 24.792.450.000,00	APBD
6.	Pembinaan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp 12.663.814.350,00	APBD
7.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp 8.596.700.000,00	APBD
8.	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Lainnya	Rp 5.312.200.000,00	APBD
9.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan	Rp 5.499.950.000,00	APBD



Air Limbah			
10.	Pengendalian Banjir	Rp 15.460.588.894,00	APBD
11.	Perencanaan Tata Ruang	Rp 2.495.200.000,00	APBD
12.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 335.500.000,00	APBD
13.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Kontruksi	Rp 3.378.900.000,00	APBD
14.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Rp 306.000.000,00	APBD
Cakupan Provinsi			
15.	Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM	Rp 645.000.000,00	APBD
16.	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 435.250.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 470.490.184.102,00	

Tanjung Selor, 2 Maret 2020

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Utara,

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman,

SUNARDI, ST., M.T
NIP. 19620906 199303 1 003



BAB III

(LKJiP) 2020





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2020 Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara menetapkan 9 (Sembilan) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 2020.

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Perumahan, Tata Ruang dan Pertanahan serta Jasa Konstruksi. Evaluasi dan analisis kerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



Tabel : 5

**Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana pemerintahan	70%
2	Meningkatnya Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase luasan permukiman layak huni	30%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Jasa Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang profesional dan bersertifikat	50%
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Rasio jaringan irigasi	15%
		Rasio wilayah rawan banjir	11%
		Persentase ketersediaan sarana prasarana air baku	12%
5	Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	32%
6	Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terkait Pentingnya RTRW	Persentase masyarakat yang paham dan sadar pentingnya RTRW	45%
7	Meningkatnya Kualitas dan Panjang Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	65%



TABEL : 6
CAPAIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RUMUS PERHITUNGAN	TEKNIS PERHITUNGAN	KINERJA	
						CAPAIAN	PERSEN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4
1	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana pemerintahan	70%	$\frac{\text{Jumlah OPD yg memiliki kantor}}{\text{jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	$(27/41) \times 100\%$	65,85	94,08
2	Meningkatnya Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase luasan permukiman layak huni	30%	$\frac{\text{Luas Permukiman layak huni}}{\text{luas wilayah permukiman}} \times 100\%$	$(108903,6/11003) \times 100\%$	99	330
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Jasa Konstruksi	Presentase tenaga konstruksi yang profesional dan bersertifikat	50%	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yg bersertifikat}}{\text{Jumlah Keseluruhan Tenaga Kerja Konstruksi}} \times 100\%$	$(2622/3600) \times 100\%$	72,8	145,7
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Rasio jaringan irigasi	15%	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$	$(134535/2255)$	59,661	397,738
		Rasio wilayah rawan banjir	11%	$\frac{\text{Luasan daerah rawan banjir atau berpotensi banjir}}{\text{Luas Wilayah}}$	$(3554,1/13,926)$	0,255	2,320
		Presentase ketersediaan sarana prasarana air baku	12%	Debit air baku (m3/det)	-	-	-
5	Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	32%	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	$(1883/10000) \times 100\%$	18,83	58,84



6	Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terkait Pentingnya RTRW	Persentase masyarakat yang paham dan sadar pentingnya RTRW	45%	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	$(25,63/45) \times 100\%$	56,96	126,57
7	Meningkatnya Kualitas dan Panjang Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	65%	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi Mantap}}{\text{Panjang Keseluruhan Jalan}} \times 100\%$	$(121,804/851,887) \times 100\%$	14,3	22,00



TABEL : 7
CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DARI TAHUN 2018-2020

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2018			2019			2020		
			TARGET 2018 (%)	REALISASI 2018 (%)	CAPAIAN 2018 (%)	TARGET 2019 (%)	REALISASI 2019 (%)	CAPAIAN 2019 (%)	TARGET 2020 (%)	REALISASI 2020 (%)	CAPAIAN 2020 (%)
1	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana pemerintahan	26,00%	39,93%	10,38%	44,00%	60,98%	138,59%	70,00%	65,85%	94,07%
2	Meningkatnya Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase luasan permukiman layak huni	3,00%	83,15%	2,49%	25,00%	56,43%	225,72%	30,00%	99,00%	330,00%
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Jasa Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang profesional dan bersertifikat	30,00%	0,00%	0,00%	40,00%	20,00%	50,00%	50,00%	72,80%	145,60%
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Rasio jaringan irigasi	10,00%	95,80%	9,58%	13,00%	0,00%	0,00%	15,00%	59,66%	397,74%
		Rasio wilayah rawan banjir	6,00%	73,82%	4,43%	8,00%	0,00%	0,00%	11,00%	0,26%	2,32%
		Persentase ketersediaan sarana prasarana air baku	7,00%	99,00%	6,93%	9,00%	0,00%	0,00%	12,00%	0,00%	0,00%
5	Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	24,00%	77,58%	18,62%	28,00%	23,60%	84,29%	32,00%	18,83%	58,84%
6	Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terkait Pentingnya RTRW	Persentase masyarakat yang paham dan sadar pentingnya RTRW	25,00%	0,00%	0,00%	35,00%	25,00%	71,43%	45,00%	56,96%	126,58%
7	Meningkatnya Kualitas dan Panjang Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	47,00%	99,51%	46,77%	55,00%	12,60%	22,91%	65,00%	14,30%	22,00%



B. Capaian – Capaian di Perjanjian Kinerja

B.1 Capaian Indikator Kinerja

1. SASARAN : Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur

Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara mengidentifikasi 1 (satu) indikator kinerja utama dengan besaran capaian sudah tercapai.

a. Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan

Uraian tabel Indikator Kinerja dari Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap menggambarkan bahwa dari 5 (lima) kegiatan tersebut, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel : 8

**Indikator Kinerja dari Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana
Pemerintah Tahun 2020**

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Pembangunan Gedung Kantor	8	9	Unit	112,5
Pembangunan Gedung Kantor SKPD	7	2	Unit	28,57
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum	1	1	Unit	100
Pelaksanaan Pengadaan Tanah	170	0	Hektar	0
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	1	0	Persen	0

Tabel : 9
Perbandingan Indikator Kinerja dari Persentase Ketersediaan Sarana
Prasarana Pemerintahan Tahun 2016-2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN	Pembangunan Gedung Kantor	8	0	10	13	9	9	Unit	112,5
	Pembangunan Gedung Kantor SKPD	7	0	1	1	1	2	Unit	28,57
	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum	1	0	1	2	0	1	Unit	100
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	170	0	1	470	1		Hektar	0
	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	1	0	0	470	0		Persen	0

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 5 (lima) kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu) program yaitu:

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan kegiatan pada masing-masing indikator kinerja utama adalah:

1. Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah :

1. Pembangunan Gedung Badan Intelijen Negara (BIN);
2. Pembangunan Gedung KORTASKOR Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;



3. Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulungan Tahap V;
4. Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulungan Tahap VI;
5. Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Nunukan Tahap I;
6. Rehab Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahap II;
7. Rehabilitasi di Lingkungan Kepolisian Resor Malinau Tahap II;
8. Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tarakan; dan
9. Pembangunan Gedung Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Tahap VI.

2. Pembangunan Gedung Kantor SKPD

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah :

1. Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahap II; dan
2. Pembangunan Guest House Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan Tahap II.

3. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah :

1. Pematangan Lahan Workshop dan Laboratorium PU

4. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020 pada triwulan pertama pembayaran sisa hutang di tahun 2019 sebesar Rp. 46.184.847.093,- dan kegiatan land clearing, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara;



2. Jasa Pembangunan Pembatas Lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Tahap 2;
3. Pembangunan Pembatas Lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Tahap 3;
4. Land Clearing Kota Baru Mandiri Segmen V Tahap I; dan
5. Land Clearing Kota Baru Mandiri Segmen VI Tahap I.

5. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2020 di kegiatan ini tidak dilaksanakan.

2. SASARAN : Meningkatnya Kawasan Permukiman Yang Layak

Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara mengidentifikasi 1 (satu) indikator kinerja utama dengan besaran capaian sudah tercapai, dikarenakan terpenuhinya target dari **program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman serta Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah**

a. Persentase Luasan Permukiman Layak Huni

Uraian tabel Indikator Kinerja dari Persentase Luasan Permukiman Layak Huni pada tahun 2020 hanya memiliki 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Tabel : 10

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan
Permukiman Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	25	25	Hektar	100



Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan	25	25	Hektar	100
--	----	----	--------	-----

Tabel : 11
Perbandingan Program Pembinaan dan Pengembangan
Infrastruktur Kawasan Permukiman Baik Tahun 2016-2017-2018-2019-
2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
PERSENTASE LUASAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	25	0	0	0	40	25	Hektar	100
	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan	25	0	0	0	50	25	Hektar	100

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 2 (dua) kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah :

1. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Tanjung Rumbia Kabupaten Bulungan;
2. Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Polda Kalimantan Utara;
3. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Tanjung Rumbia Kabupaten Bulungan Tahap III; dan



4. Pembangunan Jalan Lingkungan Gedung Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah :

1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Tanjung Buka Tahap II; dan
2. Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Tahap II.

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Tabel : 12

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	5	2	Satuan Permukiman	40
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	4	1	Unit	25

Tabel : 13
Perbandingan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah Tahun 2016-2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
PERSENTASE LUASAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	5	0	0	0	0	2	Satuan Permukiman	40
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	4	0	0	0	2	1	Unit	25

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 2 (dua) kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk awal tahun 2020 sudah direncanakan pembangunan MCK Umum di Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan, karena adanya wabah Covid-19 maka paket tersebut dihapuskan.

2. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja utama ini adalah :

1. Revitalisasi Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan Tanjung Selor Tahap II.

3. SASARAN : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Jasa Konstruksi

Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara mengidentifikasi 1 (satu) indikator kinerja utama dengan besaran capaian sudah tercapai, serta terdapat 2 (dua) program yaitu **Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi** serta



Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi.

a. Persentase Tenaga Konstruksi yang Profesional dan Bersertifikat

Uraian tabel Indikator Kinerja dari Persentase Tenaga Konstruksi yang Profesional dan Bersertifikat bahwa terdapat 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan, secara umum berhasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1. Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

Tabel : 14

Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	80	550	Orang	687,5
Kerjasama Lembaga dan Masyarakat dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1	1	Kali	100

Tabel : 15

Perbandingan Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Tahun 2016-2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
PERSENTASE TENAGA KONSTRUKSI YANG PROFESIONAL DAN BERSERTIFIKAT	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	80	0	0	0	1215	550	Orang	687,5
	Kerjasama Lembaga dan Masyarakat dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1	0	0	0	1	1	Kali	100



2. Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi

Tabel : 16

Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan
Daerah Provinsi Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi	1	0	Kali	0

Tabel : 17

Perbandingan Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi Tahun 2016-2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
PERSENTASE TENAGA KONSTRUKSI YANG PROFESIONAL DAN BERSERTIFIKAT	Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi	1	0	0	0	1	0	Kali	0

Dalam mewujudkan Indikator Kinerja dari Persentase Tenaga Konstruksi yang Profesional dan Bersertifikat dengan 3 (tiga) kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 2 (dua) program, yaitu :

Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

Dengan kegiatan pada masing-masing indikator kinerja utama adalah :

1. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Pembekalan teknis/uji kompetensi dan sertifikasi tenaga ahli bidang konstruksi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD);
 - a. Ahli Teknik Bangunan Gedung



- b. Ahli Teknik Jalan
- c. Ahli Manajemen Proyek
- d. Ahli K3 Konstruksi
- e. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
2. Setifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Siswa Kejuruan Bidang Juru Gambar dan Bangunan Umum;
3. Setifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Siswa Bidang Juru Gambar Arsitektur;
4. Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Bidang Bangunan Umum;
5. Setifikasi Tenaga Ahli Bidang Konstruksi Berbasisi Daring/Online (Ahli K3 Konstruksi);
6. Pelatihan dan Uji Kompetensi/Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Bidang Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti; dan
7. Pelatihan dan Serifikasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Kalimantan Utara Bidang Tukang Kayu dan Tukang Cor Beton.

4. SASARAN : Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air

Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara mengidentifikasi 3 (tiga) indikator kinerja utama, tapi untuk tahun 2020 hanya mendukung 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

a. Rasio Jaringan Irigasi

Dalam indikator kinerja ini terdapat 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan yaitu :

- 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**

Tabel : 18

Capaian Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi	1	2	Dokumen	200
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	2	0	KM	0
O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara	400	0	Meter	0

Tabel : 19

Perbandingan Capaian Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun 2016-2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
RASIO JARINGAN IRIGASI	Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi	1	6	15	12	3	2	Dokumen	200
	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	2	0	0	12	0	0	KM	0
	O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara	400	0	1	12	1	0	Meter	0

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Dengan kegiatan pada masing-masing indikator kinerja utama adalah:

1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Konsultan Individual Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
2. Perencanaan Pembangunan Jalan Inspeksi D.I. Tanjung Buka SP.9 Kab. Bulungan.



2. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2020 awal sudah dilaksanakan tapi karena adanya reconfusing anggaran sehingga kegiatannya dibatalkan, paket kegiatan tersebut adalah :

1. Peningkatan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkap D.I.R. Sinualan Pantai Kab. Nunukan (P = 2180 Meter S = 2070 M Pintu = 2 Unit) (DAK)

3. O/P Jaringan, Bangunan Irigasi Provinsi Kalimantan Utara

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA);
2. Survei Pengelolaan Aset dan Evaluasi Kinerja Secara Elektronik pada D.I Bengalun Kab. Malinau;
3. Survei Pengelolaan Aset dan Evaluasi Kinerja Secara Elektronik pada D.I Seimenggaris Kab. Nunukan; dan
4. Peningkatan Pompa dan Pelengkap D.I.R Sajau Hilir Kab. Bulungan.

2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Tabel : 20

Capaian Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3	0	Dokumen	0
Pengelolaan Sungai	2	4	Dokumen	200

Tabel : 21
Perbandingan Capaian Program Pengembangan, Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Tahun 2016-2017-
2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
RASIO JARINGAN IRRIGASI	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3	0	0	0	3	0	Dokumen	0
	Pengelolaan Sungai	2	0	4	3	3	4	Dokumen	200

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Dengan kegiatan pada masing-masing indikator kinerja utama adalah:

1. Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2020 awal telah di rencanakan Penyusunan Dokumen Lingkungan Air Baku KIPi Tanah Kuning tapi karena adanya wabah Covid-19 dengan kebijakan recofusing anggaran, maka paket kegiatan tersebut dibatalkan.

2. Pengelolaan Sungai di Provinsi Kalimantan Utara

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Pembangunan Pos Hidrometri Long Bia WS Kayan;
2. Operasional Pos Hidrometri dan Klimatologi WS Kayan;
3. Kajian Agradasi, Sedimen Transport, dan Morfologi Wilayah Sungai Kayan; dan
4. Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Kayan Tahap II.



b. Rasio Wilayah Rawan Banjir

Indikator kinerja dalam rasio wilayah rawan banjir terdapat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan seperti pada tabel berikut

Tabel : 22

Capaian Program Pengendalian Banjir Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir	800	239	Meter	29,88

Tabel : 23

Perbandingan Capaian Program Pengendalian Banjir Tahun 2016-2017-
2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
RASIO WILAYAH RAWAN BANJIR	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir	800	0	1	12	4	239	Meter	29,88

Dalam mewujudkan indikator kinerja ini dengan 1 (satu) kegiatan utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 1 (satu) program, yaitu:

Program Pengendalian Banjir

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir

1. Pembangunan Kanal Pengendali Banjir Tanjung Selor Tahap V; dan
2. Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tahap V;

5. SASARAN : Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni

Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara mengidentifikasi 1 (satu) indikator kinerja utama dengan 2 (dua) program, yaitu :



a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Dalam indikator kinerja ini terdapat 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Program Pengembangan Perumahan

Tabel : 24

Capaian Program Pengembangan Perumahan Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan	3	1	Kajian	33,33
Stimulasi pembangunan Perumahan Masyarakat	400	401	Unit	100,25
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	1	28,9	KM	2890
Pembangunan Rumah Layak Huni	200	0	Unit Rumah Swadaya	0

Tabel : 25

Perbandingan Capaian Program Pengembangan Perumahan Tahun 2016-2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan	3	0	3	5	4	1	Kajian	33,33
	Stimulasi pembangunan Perumahan Masyarakat	400	0	320	535	1	401	Unit	100,25



Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	1	0	1	1	7	28,9	KM	2890
Pembangunan Rumah Layak Huni	200	0	0	1	1	0	Unit Rumah Swadaya	0

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Tabel : 26

Capaian Program Lingkungan Sehat Perumahan Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	50	50	Unit	100

Tabel : 27

Perbandingan Capaian Program Lingkungan Sehat Perumahan Tahun
2016-2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	50	0	0	0	47	50	Unit	100

Dalam mewujudkan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 2 (dua) program, yaitu:

Program Pengembangan Perumahan

1. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Penyusunan Informasi/Database Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Nunukan (Daratan Provinsi Kalimantan Utara)

2. Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Konsultan Manajemen Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2020 dilaksanakan di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagai berikut ;

1. Kabupaten Bulungan 47 (empat puluh tujuh) Ruas;
2. Kabupaten Nunukan 85 (delapan puluh lima) Ruas;
3. Kabupaten Tana Tidung 7 (tujuh) Ruas; dan
4. Kota Tarakan 31 (tiga puluh satu) Ruas.

4. Pembangunan Rumah Layak Huni

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola dan Mushola Rumah Susun ASN.

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1. Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :



1. Belanja Jasa Konsultasi Pendamping Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Masyarakat Kurang Mampu.

6. SASARAN : Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terkait Pentingnya RTRW

Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara mengidentifikasi 1 (satu) indikator kinerja utama dengan 3 (tiga) program, yaitu :

a. Persentase Masyarakat Yang Paham dan Sadar Pentingnya RTRW

Uraian tabel Indikator Kinerja dari Persentase Masyarakat yang Paham dan Sadar Pentingnya RTRW terdapat 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan yang mendukung dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang

Tabel : 28

Capaian Program Perencanaan Tata Ruang Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	1	0	Kegiatan	200
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	3	1	Dokumen	0
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	1	1	Kegiatan	0



Tabel : 29
Perbandingan Capaian Program Perencanaan Tata Ruang Tahun 2016-
2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
PESENTASE MASYARAKAT YANG PAHAM DAN SADAR PENTINGNYA RTRW	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	1	0	0	0	0	0	Kegiatan	200
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	3	0	0	0	1	1	Dokumen	0
	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	1	0	0	0	1	1	Kegiatan	0

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tabel : 30
Capaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	1	Dokumen	100



Tabel : 31

Perbandingan Capaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2016-
2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
PESENTASE MASYARAKAT YANG PAHAM DAN SADAR PENTINGNYA RTRW	Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1	0	0	0	0	1	Dokumen	100

3. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tabel : 32

Capaian Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Catur Tertib Administrasi Pertanahan	1	1	Kegiatan	100

Tabel : 33

Perbandingan Capaian Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2016-2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
PESENTASE MASYARAKAT YANG PAHAM DAN SADAR PENTINGNYA RTRW	Catur Tertib Administrasi Pertanahan	1	0	0	0	0	1	Kegiatan	100

Dalam mewujudkan Indikator Kinerja ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan program yaitu:

Program Perencanaan Tata Ruang

Dengan kegiatan pada masing – masing indikator kinerja utama adalah :

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Konsultan Individu Bidang Tata Ruang;
2. Proses validasi KLHS RTR Kawasan Strategis Provinsi KIP Mangkupadi Tanah Kuning Kab. Bulungan;
3. Proses legalisasi perda RTR Kawasan Strategis Provinsi KIP Mangkupadi Tanah Kuning Kab. Bulungan; dan
4. Pengembangan Aplikasi simtaru Provinsi Kalimantan Utara.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dengan kegiatan pada masing – masing indikator kinerja utama :

1. Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Penyusunan Norma Standar dan Kriteria pengendalian pemanfaatan ruang.

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang

Dengan kegiatan pada masing – masing indikator kinerja utama :

1. Catur Tertib Administrasi Pertanahan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Belanja Jasa Pengukuran Kadastral dan Topografi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahap I; dan
2. Belanja Modal Sertifikasi Ruas Jalan Provinsi Kalimantan Utara Tahap I



7. SASARAN : Meningkatnya Kualitas dan Panjang Jalan

Dalam pencapaian strategi ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara mengidentifikasi 1 (satu) indikator kinerja utama dengan 3 (tiga) program, yaitu :

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Uraian tabel Indikator Kinerja dari Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap terdapat 5 (lima) program yang mendukung dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pembanguna Jalan dan Jembatan

Tabel : 34

Capaian Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Pembangunan Jalan	5	17,885	KM Jalan Baru	357,7
		19,385	KM Peningkatan Jalan	

Tabel : 35

Perbandingan Capaian Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun
2016-2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	Pembangunan Jalan	5	40	49	6	24	17,89	KM Jalan Baru	357,7
			0	0	0	0	19,39	KM Peningkatan Jalan	



2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Tabel : 36

Capaian Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	500	182	Meter	36,4

Tabel : 37

Perbandingan Capaian Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Tahun 2016-2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	500	0	0	0	0	182	Meter	36,4

3. Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tabel : 38

Capaian Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tahun 2020

KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SATUAN	PERSEN
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	1	4,65	KM	465



Tabel : 39
Perbandingan Capaian Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Tahun 2016-2017-2018-2019-2020

INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET 2020	REALISASI					SATUAN	PERSEN CAPAIAN 2020
			2016	2017	2018	2019	2020		
PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	1	0	0	0	0	4,65	KM	465

Dalam mewujudkan Indikator Kinerja ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dengan kegiatan pada masing – masing indikator kinerja utama adalah :

1. Pembangunan Jalan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Pembangunan Jalan Menuju Bapelkes Tanjung Selor;
2. Rekonstruksi Jalan Simpang Bumi Rahayu KM. 9 - Mako Brigif 24/Bulungan Cakti;
3. Pelebaran Jalan Ruas Jalan Durian Tanjung Selor;
4. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nunukan Ruas Jalan Mamolo - Sei. Mengkadu - Sei. Banjar;
5. Pembangunan Jalan Pendekat Menuju Jembatan Bulungan - Tarakan Ruas Jalan Aki Pingka - Suwaran - Koridor Bulungan - Tarakan Sisi Tarakan;
6. Pembangunan Jalan Perbatasan Krayan Ruas Jalan Long Layu - PaUpun;
7. Pembangunan Jalan Ring Road Malinau Ruas Jalan Simpang Sempayang - Simpang Batu Kajang;

8. Pembangunan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Pelabuhan Ferry Ancam;
9. Pembangunan Jalan Seputuk - Malinau Kota;
10. Peningkatan Jalan Perbatasan Ruas Jalan Long Bawan - Lembudud (DAK Penugasan);
11. Peningkatan Jalan Perbatasan Ruas Jalan Long Rungan - Long Padi (DAK Penugasan);
12. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Pelabuhan Ferry Ancam (DAK Reguler);
13. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Ring Road Kota Tarakan (Juata Laut - Binalatung);
14. Survei Kondisi Jalan; dan
15. Survei Kondisi Jembatan.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Dengan kegiatan pada masing – masing indikator kinerja utama adalah :

1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Pembangunan Saluran Drainase dan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Manunggal Tanjung Selor; dan
2. Pembangunan Double Box Culvent Sungai Lungun Jalan Perjuangan RT.1 RW.1 Sabanar Baru Tanjung Selor Kab. Bulungan.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dengan kegiatan pada masing – masing indikator kinerja utama adalah :

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tarakan Ruas Jalan Bhayangkara;



2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Selimau I - Selimau III Tanjung Selor;
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Tideng Pale; dan
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Tideng Pale (DAK Reguler).

B.2 Capaian Program dan Kegiatan

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	a	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat telah terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,57%
	b	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 93,39%
	c	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan terealisasi fisik sebesar 84,01% dan keuangan 83,09%
	d	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 92,82%
	e	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja terealisasi fisik sebesar 96,45% dan keuangan 86,68%
	f	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,86%
	g	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan terealisasi fisik sebesar 96,99% dan keuangan 94,72%
	h	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,99%
	i	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 92,63%
	j	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terealisasi fisik sebesar 92,19% dan keuangan 86,97%
	k	Kegiatan penyediaan makan dan minuman terealisasi fisik sebesar 91,82% dan keuangan 77,03%
	l	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,85%
	m	Kegiatan rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,70%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	



a	Kegiatan pembangunan gedung kantor realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,50% yang meliputi :	
	1	Pembangunan Gedung Badan Intelijen Negara (BIN);
	2	Pembangunan Gedung KORTASKOR Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara
	3	Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulungan Tahap V
	4	Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulungan Tahap VI
	5	Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Nunukan Tahap I
	6	Rehab Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Selor Tahap II
	7	Rehabilitasi di Lingkungan Kepolisian Resor Malinau Tahap II
	8	Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tarakan
	9	Pembangunan Gedung Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Tahap VI
	10	Review DED Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Utara
	11	Pematangan Lahan Gedung BPU Tanjung Palas Tahap III
	12	Pekerjaan Interior dan Landscape Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta Tahap IV
	13	Pekerjaan Penunjang Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta
b	Kegiatan pembangunan Gedung Kantor SKPD realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,45% yang meliputi :	
	1	Pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahap II
	2	Pembangunan Guest House Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan Tahap II
	3	Perencanaan Pembangunan Interior dan Meubelair Guest House Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan
	4	Perencanaan Interior dan Meubelair Gedung Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
	5	Pekerjaan Interior dan Meubelair Gedung Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
	6	Perencanaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
	7	Perencanaan Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
	8	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara
	9	Perencanaan Kantor Diklat Provinsi Kalimantan Utara
	10	Perencanaan Laboratorium CAT Provinsi Kalimantan Utara



	c	Kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,06% yang meliputi :	
	1	Pematangan Lahan Workshop dan Laboratorium PU	
	2	Pengadaan Website Sistem Informasi Pelayanan Penataan Bangunan Keciaptakarya	
	d	Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,31%	
	e	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,99%	
	f	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terealisasi fisik sebesar 99,93% dan keuangan 99,85%	
	g	Kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah terealisasi fisik sebesar 75,39% dan keuangan 75,28% yang meliputi :	
	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara	
	2	Pembangunan Pembatas Lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Tahap 2	
	3	Pembangunan Pembatas Lahan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara Tahap 3	
	4	Land Clearing Kota Baru Mandiri Segmen V Tahap I	
	5	Land Clearing Kota Baru Mandiri Segmen VI Tahap I	
	h	Kegiatan penyerahan hasil pengadaan tanah terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 34,37%	
	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	a	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal terealisasi fisik sebesar 80% dan keuangan 54,47%	
	4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
	a	Kegiatan pembangunan jalan realisasi fisik sebesar 99,93% dan keuangan 99,84% yang meliputi :	
	1	Pembangunan Jalan Menuju Bapelkes Tanjung Selor	
	2	Rekonstruksi Jalan Simpang Bumi Rahayu KM. 9 - Mako Brigif 24/Bulungan Cakti	
	3	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Durian Tanjung Selor	
	4	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nunukan Ruas Jalan Mamolo - Sei. Mengkadu - Sei. Banjar	
	5	Pembangunan Jalan Pendekat Menuju Jembatan Bulungan - Tarakan Ruas Jalan Aki Pingka -Suwaran - Koridor Bulungan - Tarakan Sisi Tarakan	
	6	Pembangunan Jalan Perbatasan Krayan Ruas Jalan Long Layu - PaUpa	



	7	Pembangunan Jalan Ring Road Malinau Ruas Jalan Simpang Sempayang - Simpang Batu Kajang
	8	Pembangunan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Pelabuhan Ferry Ancam
	9	Pembangunan Jalan Seputuk - Malinau Kota
	10	Peningkatan Jalan Perbatasan Ruas Jalan Long Bawan - Lembudud (DAK Penugasan)
	11	Peningkatan Jalan Perbatasan Ruas Jalan Long Rungan - Long Padi (DAK Penugasan)
	12	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Pelabuhan Ferry Ancam (DAK Reguler)
	13	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Ring Road Kota Tarakan (Juata Laut - Binalatung)
	14	Survei Kondisi Jalan
	15	Survei Kondisi Jembatan
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
	a	Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong realisasi fisik sebesar 98,96% dan keuangan 95,57% yang meliputi :
	1	Pembangunan Saluran Drainase dan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Manunggal Tanjung Selor
	2	Pembangunan Double Box Culvent Sungai Lungun Jalan Perjuangan RT.1 RW.1 Sabanar Baru Tanjung Selor Kab. Bulungan
6	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	a	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan realisasi fisik sebesar 99,97% dan keuangan 99,89% yang meliputi :
	1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tarakan Ruas Jalan Bhayangkara
	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Selimau I - Selimau III Tanjung Selor
	3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Tideng Pale
	4	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Trans Kalimantan - Tideng Pale (DAK Reguler)
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	
	a	Kegiatan perencanaan jaringan irigasi realisasi fisik sebesar 85,22% dan keuangan 82,37% yang meliputi :
	1	Konsultan Individual Pengelolaan Sumber Daya Air
	2	Perencanaan Pembangunan Jalan Inspeksi D.I. Tanjung Buka SP.9 Kab. Bulungan
	b	Kegiatan peningkatan jaringan irigasi rawa terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 100%



	c	Kegiatan O/P jaringan, bangunan irigasi di Provinsi Kalimantan Utara realisasi fisik sebesar 74,73% dan keuangan 72,58% yang meliputi :	
		1	Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)
		2	Survei Pengelolaan Aset dan Evaluasi Kinerja Secara Elektronik pada D.I Bengalun Kab. Malinau
		3	Survei Pengelolaan Aset dan Evaluasi Kinerja Secara Elektronik pada D.I Seimenggaris Kab. Nunukan
		4	Peningkatan Pompa dan Pelengkap D.I.R Sajau Hilir Kab. Bulungan
8	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		
	a	Kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 100%	
	b	Kegiatan pengelolaan sungai realisasi fisik sebesar 97,91% dan keuangan 93,50% yang meliputi :	
		1	Pembangunan Pos Hidrometri Long Bia WS Kayan
		2	Operasional Pos Hidrometri dan Klimatologi WS Kayan
		3	Kajian Agradasi, Sedimen Transport, dan Morfologi Wilayah Sungai Kayan
		4	Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Kayan Tahap II
		5	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pipa Transmisi Intake Sei. Buaya
9	Program Pengendalian Banjir		
	a	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir realisasi fisik sebesar 99,49 dan keuangan 95,55% yang meliputi :	
		1	Pembangunan Kanal Pengendali Banjir Tanjung Selor Tahap V
		2	Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tahap V
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
	a	Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 69,51%	
	b	Kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,48% yang meliputi :	
		1	Revitalisasi Jaringan Perpipaan Kawasan Perkotaan Tanjung Selor Tahap II
11	Program Perencanaan Tata Ruang		



	a	Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang terealisasi fisik sebesar 66,67% dan keuangan 50,28%	
	b	Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan realisasi fisik sebesar 87,93% dan keuangan 85,12% yang meliputi :	
		1	proses legalisasi perda RTR Kawasan Strategis Provinsi KIPI Mangkupadi Tanah Kuning Kab. Bulungan
		2	Pengembangan Aplikasi simtaru Provinsi Kalimantan Utara
	c	Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang terealisasi fisik sebesar 85,30% dan keuangan 36,69%	
12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
	a	Kegiatan penyusunan norma standar dan kriteria pengendalian pemanfaatan ruang terealisasi fisik sebesar 87,98% dan keuangan 67,12%	
13	Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi		
	a	Kegiatan pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi terealisasi fisik sebesar 96,80% dan keuangan 84,56%	
14	Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		
	a	Kegiatan pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi terealisasi fisik sebesar 80,56% dan keuangan 86,14%	
		1	Pembekalan Teknis/Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Ahli Bidang Konstruksi Program Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (P3MD)
		2	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Siswa Kejuruan Bidang Juru Gambar dan Bangunan Umum
		3	Sertifikasi Tenaga Kerampil Konstruksi Siswa Kejuruan Bidang Juru Gambar Arsitektur
		4	Sertifikasi Tenaga Kerampil Konstruksi Bidang Bangunan Umum
		5	Sertifikasi Tenaga Ahli Bidang Konstruksi Berbasis Daring/Online (Ahli K3 Konstruksi)
		6	Pelatihan dan Uji Kompetensi/Serifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Bidang Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti
		7	Pelatihan dan Sertifikasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Kalimantan Utara Bidang Tukang Kayu dan Tukang Cor Beton
	b	Kegiatan lembaga dan masyarakat jasa konstruksi terealisasi fisik sebesar 83,91% dan keuangan 82,63%	
15	Program Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM		



	a	Kegiatan penyusunan sistem informasi DPU terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99%	
	b	Kegiatan penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,29%	
16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		
	a	Kegiatan catur tertib administrasi pertanahan terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 87,69% yang meliputi :	
		1	Belanja Jasa Pengukuran Kadastral dan Topografi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahap I
		2	Belanja Modal Sertifikasi Ruas Jalan Provinsi Kalimantan Utara Tahap I
17	Program Pengendalian Perumahan		
	a	Kegiatan penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan terealisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 88,43% yang meliputi :	
		1	Penyusunan Informasi/Database Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Nunukan (Daratan Provinsi Kalimantan Utara)
	b	Kegiatan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 91,12% yang meliputi :	
		1	Konsultan Manajemen Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
	c	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dengan realisasi fisik sebesar 99,96% dan keuangan 98,84% yang meliputi :	
		Kabupaten Bulungan	
		1	Peningkatan Jalan Lingkungan Duku Gang Berdikari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
		2	Peningkatan Jalan Lingkungan Padat Karya Gang Idaman Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
		3	Peningkatan Jalan Lingkungan Serindit Gang Kila Tembus Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
		4	Peningkatan Jalan Lingkungan Padat Karya Gang Ahmad Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
		5	Peningkatan Jalan Lingkungan Padat Karya Gang Mandiri Sabanar Baru Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
		6	Peningkatan Jalan Lingkungan Damai Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
		7	Peningkatan Jalan Lingkungan Rajawali Gang Perawat Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
		8	Peningkatan Jalan Lingkungan Rajawali Gang Delima Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
	9	Peningkatan Jalan Lingkungan Rawa Payau Jalur 2 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	



10	Peningkatan Jalan Lingkungan Jelarai Gang Idaman Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
11	Peningkatan Jalan Lingkungan Merak Gang Setia Selimau 1 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
12	Pembangunan Saluran Drainase Desa Salimbatu RT. 5 Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan
13	Peningkatan Jalan Lingkungan Cendrawasih Gang Kasturi Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
14	Peningkatan Jalan Lingkungan Pramuka Gang Bakti RT. 02 Kecamatan Tanjung Palas Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan
15	Peningkatan Jalan Lingkungan Jelarai Gang Puma Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
16	Peningkatan Jalan Lingkungan Wilker Sabanar Lama II Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
17	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 1) : Peningkatan Jalan Haji Sugeng Kab. Bulungan
18	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 2) : Peningkatan Jalan Lingkungan Jelarai Gang Jawara Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
19	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 3) : Peningkatan Jalan Lingkungan Padat Karya Gang Masjid Fajar RT.80 Sabanar Baru Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
20	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 4) : Peningkatan Jalan Lingkungan Sabanar Lama II Gang Wartawan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
21	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 5) : Peningkatan Jalan Lingkungan Sabanar Lama Gang Nelayan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
22	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 6) : Peningkatan Jalan Gang Niaga III
23	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 7) : Peningkatan Jalan Lingkungan Ahmad Yani Gang Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
24	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 8) : Peningkatan Jalan Lingkungan Semangka Gang Dalam Taka Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
25	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 9) : Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Bukit Matoa Sabanar Baru Tanjung Selor
26	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 10) : Peningkatan Jalan Lingkungan Kiemas Kertosono Gang Bakti RT. 04 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan
27	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 11) : Peningkatan Jalan Lingkungan Hidayatullah Lanjutan II



28	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 12) : Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Bersama Jalan Perdamaian Sabanar Baru Kecamatan Tanjung Selor Tahap II
29	Peningkatan Jalan Lingkungan Kiemas Kertosono Gang Bakti RT. 04 Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan
30	Peningkatan Jalan Lingkungan Jelarai Gang Jawara Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
31	Peningkatan Jalan Lingkungan Padat Karya Gang Masjid Fajar RT.80 Sabanar Baru Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
32	Peningkatan Jalan Gang Niaga III
33	Peningkatan Jalan Lingkungan Semangka Gang Dalam Taka Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
34	Peningkatan Jalan Lingkungan Sabanar Lama II Gang Wartawan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
35	Peningkatan Jalan Lingkungan Sabanar Lama Gang Nelayan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
36	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Bukit Matoa Sabanar Baru Tanjung Selor
37	Peningkatan Jalan Lingkungan Ahmad Yani Gang Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
38	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Bersama Jalan Perdamaian Sabanar Baru Kecamatan Tanjung Selor Tahap II
39	Peningkatan Jalan Lingkungan H Sugeng
40	Peningkatan Jalan Lingkungan Padat Karya Gang Masjid Fajar RT.80 Sabanar Baru Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
41	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Bukit Matoa Sabanar Baru Tanjung Selor
42	Peningkatan Jalan Lingkungan Semangka Gang Dalam Taka Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
43	Peningkatan Jalan Lingkungan Perdamaian Gang Majid RT. 79 Sabanar Baru Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
44	Peningkatan Jalan Lingkungan Batu Bata Gang AT-Taubah 1 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
45	Peningkatan Jalan Lingkungan KORPRI Tanjung Selor
46	Peningkatan Jalan Kantil Tanjung Selor (400 m)
47	Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Jalan Rusun ASN Prov. Kaltara (Lanjutan)
Kabupaten Nunukan	



48	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan belakang RSUD Nunukan RT 4 Desa Binusan, Kab. Nunukan
49	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Kasim RT 9 Kelurahan Selisun Kec Nnk selatan, Kab. Nunukan
50	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Sanusi RT 15 Selisun kecamatan Nunukan Selatan, Kab. Nunukan
51	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Menuju Perumahan Barak
52	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Rumah Adat Hikma Sebatik RT 6 Dusun Maiwah Desa Kaspul Kecamatan Sebatik Tengah, Kab. Nunukan
53	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ibadurrahman RT 05 Selisun, Kab. Nunukan
54	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gabriel Manik RT 13 Kel. Selisun, Kab. Nunukan
55	Peningkatan Jalan Lingkungan Pelabuhan Gang Kamboja, Kab. Nunukan
56	Peningkatan Jalan Lingkungan Samping Polsek KPPP Gg. Daffa, Kab. Nunukan
57	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Maspul RT 7 RW 2 Kelurahan Selisun, Kab. Nunukan
58	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Sedadap Ujung RT 02 Kelurahan Nunukan Selatan, Kab. Nunukan
59	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 03 Lapri Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan
60	Peningkatan Jalan Lingkungan Drainase Menuju SMP 2 Sebatik Desa Balansiku Kec. Sebatik, Kab. Nunukan
61	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sei Limau Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan
62	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 Menuju Kuburan Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan
63	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju SMP 2 Sebatik Desa Balansiku Kec. Sebatik, Kab. Nunukan
64	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg Derru RT 03 Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan
65	Peningkatan Jalan Lingkungan Penghubung RT 01 menuju RT 03 Kec. Lumbis, Kab. Nunukan
66	Peningkatan Jalan Lingkungan Tanjung Hulu Kec. Lumbis, Kab. Nunukan
67	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sangkup Kec. Lumbis, Kab. Nunukan
68	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 1) Peningkatan Jalan Lingkungan Pong Tiku (Kampung Tator Dalam) Kel Nunukan Tengah
69	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 2) Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Bukit Marwa Kab Nunukan
70	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 3) Peningkatan Jalan Gang Toraja RT 10 Kelurahan Nunukan Tengah
71	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 4) Peningkatan Jalan Lingkungan jalan Gg. Nangka ujang Dewa Nunukan
72	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 5) Peningkatan Jalan Gang Nanas RT 20 Kelurahan Nunukan Tengah



73	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 6) Peningkatan Jalan terusan Antasari RT 13 Kelurahan Selisun
74	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 7) Peningkatan Jalan Bidul RT 29 Persemaian Nunukan Barat
75	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 8) Peningkatan Jalan Renya Rosari RT 13 Kelurahan Selisun
76	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 9) Peningkatan Jalan Ujang Dewa RT 2 Rw. 1 Kelurahan Nunukan Selatan
77	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 10) Peningkatan Jalan Gang Limau RT 3 Rw. 1 Kelurahan Nunukan Selatan
78	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 11) Pembangunan Jalan Pemukiman RT 09 Desa Setabu Kec. Sebatik Barat
79	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 12) Pembangunan Jalan Pemukiman RT 02 Tanjung Harapan Sebatik Timur
80	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 13) Pembangunan Semenisasi Jalan Pangeran Antasari RT 14 Kel Nunukan Tengah
81	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 14) Peningkatan jalan menuju masjid Al-Azka RT 8 Nunukan Timur
82	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 15) Pembangunan dan Peningkatan Jalan kampung Baru Selisun-Perumahan Griya
83	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Nunukan (Ruas 16) Pembangunan jalan semenisasi permukiman warga Teuku Umar RT 13 belakang mess Krayan menuju Griya BNI
84	Peningkatan Jalan Lingkungan Pelabuhan Gang Kamboja, Kab. Nunukan
85	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan belakang RSUD Nunukan RT 4 Desa Binusan, Kab. Nunukan
86	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Maspul RT 7 RW 2 Kelurahan Selisun, Kab. Nunukan
87	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Ibadurrahman RT 05 Selisun, Kab. Nunukan
88	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gabriel Manik RT 13 Kel. Selisun Kab. Nunukan
89	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Menuju Perumahan Barak
90	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Kasim RT 9 Kelurahan Selisun Kec.Nunukan Selatan Kab. Nunukan
91	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Sanusi RT 15 Selisun kecamatan Nunukan Selatan, Kab. Nunukan
92	Peningkatan Jalan Lingkungan Samping Polsek KPPP Gg. Daffa, Kab. Nunukan
93	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Sedadap Ujung RT 02 Kel. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan
94	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 Menuju Kuburan Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan
95	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju SMP 2 Sebatik Desa Balansiku Kec. Sebatik, Kab. Nunukan



96	Peningkatan Jalan Lingkungan Drainase Menuju SMP 2 Sebatik Desa Balansiku Kec. Sebatik, Kab. Nunukan
97	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg Derru RT 03 Desa Sei Pancang Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan
98	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 03 Lapri Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan
99	Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Rumah Adat Hikma Sebatik RT 6 Dusun Maiwah Desa Kaspul Kecamatan Sebatik Tengah, Kab. Nunukan
100	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sei Limau Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan
101	Peningkatan Jalan Lingkungan Penghubung RT 01 menuju RT 03 Kec. Lumbis, Kab. Nunukan
102	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sangkup Kec. Lumbis, Kab. Nunukan
103	Peningkatan Jalan Lingkungan Tanjung Hulu Kec. Lumbis, Kab. Nunukan
104	Pembangunan Jalan Pemukiman RT 09 Desa Setabu Kec. Sebatik Barat
105	Pembangunan Jalan Pemukiman RT 02 Tanjung Harapan Sebatik Timur
106	Pembangunan jalan semenisasi permukiman warga Teuku Umar RT 13 belakang mess Krayan menuju Griya BNI
107	Peningkatan Jalan Gang Toraja RT 10 Kelurahan Nunukan Tengah
108	Peningkatan Jalan Lingkungan jalan Gg. Nangka ujang Dewa Nunukan
109	Peningkatan Jalan Gang Nanas RT 20 Kelurahan Nunukan Tengah
110	Peningkatan Jalan terusan Antasari RT 13 Kelurahan Selisun
111	Peningkatan Jalan Bidul RT 29 Persemaian Nunukan Barat
112	Peningkatan Jalan Renya Rosari RT 13 Kelurahan Selisun
113	Peningkatan Jalan Ujang Dewa RT 2 RW 1 Kelurahan Nunukan Selatan
114	Peningkatan Jalan Gang Limau RT 3 RW 1 Kelurahan Nunukan Selatan
115	Peningkatan Jalan Lingkungan Pong Tiku (Kampung Tator Dalam) Kel Nunukan Tengah
116	Pembangunan Semenisasi Jalan Pangeran Antasari RT 14 Kel Nunukan Tengah
117	Pembangunan dan Peningkatan Jalan kampung baru Selisun-Perumahan Griya
118	Peningkatan jalan menuju masjid Al-Azka RT 8 Nunukan Timur
119	Peningkatan Jalan Lingkungan jalan Gg. Nangka ujang Dewa Nunukan
120	Peningkatan Jalan Gang Nanas RT 20 Kelurahan Nunukan Tengah
121	Peningkatan Jalan terusan Antasari RT 13 Kelurahan Selisun
122	Peningkatan Jalan Bidul RT 29 Persemaian Nunukan Barat
123	Peningkatan Jalan Renya Rosari RT 13 Kelurahan Selisun
124	Peningkatan Jalan Ujang Dewa RT 2 RW 1 Kelurahan Nunukan Selatan



125	Peningkatan Jalan Gang Limau RT 3 RW 1 Kelurahan Nunukan Selatan
126	Pembangunan dan Peningkatan Jalan kampung baru Selisun-Perumahan Griya
127	Pembangunan jalan semenisasi permukiman warga Teuku Umar Rt13 belakang mess Krayan menuju Griya BNI
128	Pembangunan Jalan Pemukiman RT 09 Desa Setabu Kec. Sebatik Barat
129	Pembangunan Jalan Pemukiman RT 02 Tanjung Harapan Sebatik Timur
130	Pembangunan Semenisasi Jalan Pangeran Antasari RT 14 Kel Nunukan Tengah
131	Peningkatan jalan menuju masjid Al-Azka RT 8 Nunukan Timur
132	Peningkatan Jalan Gang Toraja RT 10 Kelurahan Nunukan Tengah
Kota Tarakan	
133	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 30 Karang Anyar Pantai, Tarakan
134	Semenisasi Jalan Mulawarman Gg. Sulawesi RT 53 Karang Anyar, Tarakan
135	Drainase Jl. Anggrek Ujung RT 15 Kelurahan Karang Anyar
136	Peningkatan Jalan RT 06 Gang Mangga Dua Kampung Empat Tarakan
137	Peningkatan Jalan Dan Siring Gang Jeruk Juata Kerikil Tarakan
138	Peningkatan Jalan Dan Drainase Gang Sengon RT 18 Kampung Satu Tarakan
139	Semenisasi Jalan Aki Balak Gang Pondok Daud, Tarakan
140	Semenisasi RT 01 Gunung Lingkas, Tarakan
141	Semenisasi Gang. Nurhidayah RT 02 Juata Permai, Tarakan
142	Semenisasi Jalan Bakar RT 01 Kel. Karang Harapan, Tarakan
143	Semenisasi Gang Swadaya RT 01 Juata Kerikil, Tarakan
144	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 1) - Peningkatan Jalan Bersama I RT 45 Pasir Putih Kelurahan Karang Anyar Tarakan
145	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 2) - Semenisasi Jalan Sungai Bengawan Gang Perumahan TKBM Tarakan
146	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 3) - Peningkatan Jalan/Jembatan RT.27 Kelurahan Selumit Pantai, Tarakan Tengah
147	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 4) - Semenisasi Jalan dan Drainase RT. 20 Kampung Satu Skip, Tarakan
148	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 5) - Peningkatan jalan lingkungan gang Rimba Raya Karang Harapan, Tarakan
149	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 6) - Peningkatan Jalan RT 24 Karang Anyar Pantai Tarakan
150	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 7) - Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Aghatis 3 dan 4 RT 05 Karang Harapan Tarakan
151	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 8) - Peningkatan Jalan Lingkungan RT 12 Gunung Lingkas Tarakan
152	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 9) - Pembangunan siring RT 26 Karang Anyar Tarakan



	153	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 10) - Peningkatan Jalan Lingkungan RT 60 Jalan Sesanip Tarakan
	154	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 11) - Peningkatan Jalan Lingkungan dan Jembatan RT 12 Pantai Amal Tarakan
	155	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 12) - Peningkatan Jalan/Jembatan Kayu Jalan Akasia RT 2 Gunung Lingkas Tarakan
	156	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 13) - Peningkatan Siring dan Jembatan RT 16 Karang Harapan Tarakan
	157	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 14) - Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Aghatis 1 RT 05 Karang Harapan Tarakan
	158	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 15) - Peningkatan Jalan/Jembatan Kayu RT 7 Jalan Tembung Juata Laut Tarakan
	159	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 16) - Peningkatan Jalan Lingkungan RT 14 Karang Anyar Pantai Tarakan
	160	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 17) - Peningkatan Jalan Dan Jembatan RT 4 Karang Harapan Tarakan
	161	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 18) - Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Anggrek 3 RT 15 Karang Anyar Tarakan
	162	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 19) - Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Anggrek 2 RT 15 Karang Anyar Tarakan
	163	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 20) - Peningkatan Jalan Lingkungan RT.07 Mamburungan Tarakan
	Kabupaten Tana Tidung	
	164	Pembangunan/Peningkatan Jalan lingkungan rumah adat Desa Bebakung Kec. Betayau
	165	Pembangunan/Peningkatan Jalan lingkungan Peningkatan Jalan Masuk Kantor Desa Seludau Kec. Sesayap Hilir
	166	Pembangunan/Peningkatan Jalan lingkungan Plat Deucker dan siring Jalan Kebun Sayur RT 04, Kec. Sesayap
	167	Pembangunan/Peningkatan Jalan lingkungan drainase Jalan Bayangkara, Desa Tideng Pale Timur, Kec. Sesayap
	168	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Tana Tidung (Ruas 1)
	169	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Tana Tidung (Ruas 2)
	170	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Tana Tidung (Ruas 3)
	d	Kegiatan pembangunan rumah layak huni dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,46% yang meliputi :
	1	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengelola dan Mushola Rumah Susun ASN
18	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
	a	Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 71,95% yang meliputi :



		1	Belanja Jasa Konsultasi Pendamping Program Peningkatan Kualitas Sanitasi Masyarakat Kurang Mampu
19	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman		
	a	Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 97,07% meliputi :	
		1	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Tanjung Rumbia Kabupaten Bulungan
		2	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Polda Kalimantan Utara
		3	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Tanjung Rumbia Kabupaten Bulungan Tahap III
		4	Pembangunan Jalan Lingkungan Gedung Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
	b	Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman pedesaan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 97,53% yang meliputi :	
		1	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Tanjung Buka Tahap II
		2	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Tahap II

C. Akuntabilitas Keuangan

Pagu Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 awal penetapan sebesar **Rp. 410.642.632.399,00 (Empat Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)**. Dimana belanja langsung sebesar **Rp. 404.520.788.102,00 (Empat Ratus Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Rupiah)**, sedangkan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 6.121.844.297,00 (Enam Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)**.

Pada pertengahan tahun berjalan terdapat perubahan anggaran (DPA-P) dimana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara mendapat tambahan anggaran sebesar **Rp. 457.101.424.879,47 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen)**. Dimana belanja langsung **Rp. 452.191.176.307,47 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus**

Tujuh Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen), sedangkan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 4.910.248.572,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).**

Kegiatan yang dijalankan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh 21 pejabat kepala bagian dan kepala seksi yang terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan
Melaksanakan 3 Kegiatan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Melaksanakan 2 Program dan 16 Kegiatan
3. Kepala Sub Bagian Keuangan
Melaksanakan Kegiatan Pembukuan dan Administrasi Keuangan
4. Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan
Melaksanakan 3 Program dan 5 Kegiatan
5. Kepala Seksi Jalan
Melaksanakan 3 Program dan 3 Kegiatan
6. Kepala Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap
Melaksanakan 2 Program dan 2 Kegiatan
7. Kepala Seksi Penataan Bangunan
Melaksanakan 1 Program dan 5 Kegiatan
8. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
Melaksanakan 1 Program dan 3 Kegiatan
9. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Sanitasi dan Air Minum
Melaksanakan 1 Program dan 2 kegiatan
10. Kepala Seksi Jaringan Irigasi, Sungai dan Rawa
Melaksanakan 3 program dan 5 kegiatan
11. Kepala seksi Operasional dan Pemeliharaan
Melaksanakan 2 Program dan 2 kegiatan
12. Kepala Seksi Pantai dan Air Baku
Melaksanakan 0 Program dan 0 kegiatan
13. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang



- Melaksanakan 2 Program dan 2 Kegiatan
- 14. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
 - Melaksanakan 0 Program dan 0 Kegiatan
- 15. Kepala Seksi Pertanahan
 - Melaksanakan 1 Program dan 2 Kegiatan
- 16. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
 - Melaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan
- 17. Kepala Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - Melaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan
- 18. Kepala Seksi Statistik dan Pengembangan Jasa Kosntruksi
 - Melaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan
- 19. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan
 - Melaksanakan 1 Program dan 2 Kegiatan
- 20. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan
 - Melaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan
- 21. Kepala Seksi Peningkatan Perumahan
 - Melaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan

Dari pagu anggaran yang diterima Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 19 (Sembilan Belas) program dan 51 (Lima Puluh Satu) kegiatan. Adapun rincian pagu anggaran per program dan kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :



Tabel : 40
Penyerapan Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2020

A. Belanja Tidak Langsung

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN MURNI/ PERGESERAN/PERUBHN	REALISASI (SP2D)		SISA PAGU ANGGARAN
			UP/GU/TU	LS	
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	271.614.790,00	301.410.386,00	0,00	263.077.602,00	8.537.188,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.638.633.782,00	5.820.433.911,00	0,00	4.502.526.255,00	136.107.527,00
JUMLAH	4.910.248.572,00	6.121.844.297,00	0,00	4.765.603.857,00	144.644.715,00

B. Belanja Langsung

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		TOTAL	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.902.304.696,00	11.357.020.619,00	88,02
penyediaan jasa surat menyurat	7.000.000,00	6.900.000,00	98,57
penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	924.000.000,00	862.881.692,00	93,39
penyediaan jasa administrasi keuangan	7.516.521.696,00	6.245.823.600,00	83,09



penyediaan jasa kebersihan kantor	1.022.550.000,00	949.144.000,00	92,82
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	304.400.000,00	263.862.500,00	86,68
penyediaan alat tulis kantor	350.000.000,00	349.509.000,00	99,86
penyediaan barang cetakan dan pengadaan	129.593.000,00	122.751.605,00	94,72
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40.000.000,00	39.996.000,00	99,99
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	451.000.000,00	417.740.480,00	92,63
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	61.340.000,00	53.350.000,00	86,97
penyediaan makanan dan minuman	160.500.000,00	123.640.000,00	77,03
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	956.400.000,00	945.354.184,00	98,85
rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	979.000.000,00	976.067.558,00	99,70
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	229.227.388.312,47	210.160.163.460,00	91,68
Pembangunan Gedung Kantor	117.017.343.269,47	116.437.882.798,00	99,50
Pembangunan Gedung Kantor SKPD	36.491.700.374,00	35.196.556.000,00	96,45
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum	3.590.283.000,00	3.556.700.000,00	99,06
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.800.000,00	10.725.000,00	99,31
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	560.000.000,00	559.946.750,00	99,99
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.347.500.000,00	2.343.942.255,00	99,85
Pelaksanaan Pengadaan Tanah	69.091.261.669,00	52.013.683.595,00	75,28
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	118.500.000,00	40.727.062,00	34,37
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	16.341.544,00	54,47
Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000,00	16.341.544,00	54,47
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan*	117.561.374.000,00	117.372.550.282,00	99,84
Pembangunan Jalan	117.561.374.000,00	117.372.550.282,00	99,84
Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	0,00
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong*	1.012.322.000,00	967.497.000,00	95,57
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1.012.322.000,00	967.497.000,00	95,57



Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan*	22.451.943.000,00	22.427.918.899,00	99,89
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	22.451.943.000,00	22.427.918.899,00	99,89
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan**	0,00	0,00	0,00
Inspeksi Kondisi Jalan	0,00	0,00	0,00
Inspeksi Kondisi Jembatan	0,00	0,00	0,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya*	1.824.929.852,00	1.385.863.261,00	75,94
Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi	351.850.000,00	289.815.000,00	82,37
Pembangunan Jaringan Irigasi	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	98.290.852,00	98.290.852,00	100,00
O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara	1.374.789.000,00	997.757.409,00	72,58
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya*	3.989.044.952,00	3.730.824.023,00	93,53
Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	16.440.000,00	16.440.000,00	100,00
Pengelolaan Sungai	3.972.604.952,00	3.714.384.023,00	93,50
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah*	4.514.342.000,00	4.423.055.640,00	97,98
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	77.600.000,00	53.938.040,00	69,51
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	4.436.742.000,00	4.369.117.600,00	98,48
Program Pengendalian Banjir**	13.750.055.000,00	13.138.371.240,00	95,55
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir	13.750.055.000,00	13.138.371.240,00	95,55
Program Perencanaan Tata Ruang*	2.681.000.000,00	1.443.225.244,00	53,83
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	30.000.000,00	15.085.000,00	50,28
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	940.500.000,00	800.579.544,00	85,12
Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	1.710.500.000,00	627.560.700,00	36,69
Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang	0,00	0,00	0,00



Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	170.500.000,00	114.440.921,00	67,12
Penyusunan Norma Standar dan Kriteria pengendalian pemanfaatan ruang	170.500.000,00	114.440.921,00	67,12
Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi**	127.800.000,00	108.066.167,00	84,56
Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi	127.800.000,00	108.066.167,00	84,56
Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	1.184.500.000,00	1.015.677.995,00	85,75
Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi	1.052.100.000,00	906.270.512,00	86,14
Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi	132.400.000,00	109.407.483,00	82,63
Program Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM**	555.000.000,00	545.678.000,00	98,32
Penyusunan sistem informasi DPU	25.000.000,00	24.750.000,00	99,00
Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an	530.000.000,00	520.928.000,00	98,29
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	215.000.000,00	188.544.122,00	87,69
Catur tertib administrasi pertanahan	215.000.000,00	188.544.122,00	87,69
Program Pengembangan Perumahan*	26.751.433.320,00	26.295.946.341,12	98,30
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	605.045.820,00	288.670.418,00	47,71
Stimulasi pembangunan Perumahan Masyarakat	1.043.075.000,00	950.483.500,00	91,12
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	25.014.612.500,00	24.971.234.194,12	99,83
Pembangunan Rumah Layak Huni	88.700.000,00	85.558.229,00	96,46
Program Lingkungan Sehat Perumahan*	179.900.000,00	129.446.500,00	71,95
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	179.900.000,00	129.446.500,00	71,95



Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman*	13.062.339.175,00	12.688.696.000,00	97,14
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	11.094.682.175,00	10.769.652.000,00	97,07
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan	1.967.657.000,00	1.919.044.000,00	97,53
JUMLAH	452.191.176.307,47	427.509.327.258,12	94,54



RINGKASAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

PERIODE TAHUN 2016 - 2020

Tahun	2016			2017			2018			2019			2020		
Anggaran	805,291,512,903.00			933,185,695,462.28			918,520,757,190.00			444,262,524,882.00			457,101,424,879.47		
Bulan	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
	Rp	%	%	Rp	%	%	Rp	%	%	Rp	%	%	Rp	%	%
Januari	131,066,789.00	0.02	0.04	156,326,478.00	0.02	0.10	195,971,484.00	0.02	0.04	-	-	0.00	46,196,874,898.00	10.11	11.54
Februari	269,149,679.00	0.03	0.04	687,284,960.00	0.07	0.21	672,400,098.00	0.07	0.14	557,674,590.00	0.13	0.11	47,416,893,219.00	10.37	11.82
Maret	1,520,971,337.00	0.19	0.33	8,237,793,871.00	0.88	0.87	2,019,356,306.00	0.22	0.33	37,781,046,599.00	8.50	5.22	72,286,842,147.00	15.81	18.49
April	3,588,428,772.00	0.45	9.84	21,360,664,567.00	2.29	4.57	48,059,596,184.00	5.23	5.06	45,689,101,485.00	10.28	6.38	88,916,522,519.12	19.45	22.10
Mei	33,482,901,992.00	4.16	10.50	29,598,458,438.00	3.17	5.44	63,221,500,640.00	6.88	7.95	62,290,103,606.14	14.02	7.73	133,157,871,026.12	29.13	33.16
Juni	138,082,149,566.00	17.15	24.55	54,149,805,547.00	5.80	10.03	108,734,854,226.00	11.84	10.65	64,279,389,768.14	14.47	9.34	151,128,775,444.12	33.06	40.16
Juli	144,260,109,267.00	17.91	26.53	83,748,263,985.00	8.97	15.47	141,577,287,700.00	15.41	12.79	88,858,216,842.16	20.00	12.76	171,128,463,328.12	37.44	51.35
Agustus	211,071,920,066.00	26.21	34.31	151,375,900,729.00	16.22	22.37	175,948,935,199.00	19.16	21.23	106,284,327,732.11	23.92	16.25	207,028,706,752.12	45.29	61.34
September	342,477,253,607.00	42.53	55.63	185,267,933,670.00	19.85	25.19	226,051,439,488.00	24.61	24.45	130,609,194,127.14	29.40	33.87	233,440,058,611.12	51.07	67.60
Oktober	375,424,764,432.00	46.62	63.56	230,606,639,288.00	24.71	26.57	288,994,344,550.00	31.46	26.26	186,030,908,636.51	41.87	44.98	269,730,677,788.00	59.01	69.17
November	446,654,819,367.00	55.46	59.54	285,180,148,956.00	30.56	33.97	339,649,615,254.00	36.98	45.21	248,366,872,811.28	55.91	71.75	313,368,114,970.00	68.56	81.48
Desember	778,831,782,964.00	96.71	99.85	565,954,773,050.00	60.65	78.81	550,132,913,353.00	59.89	60.20	417,460,476,474.98	93.97	97.84	432,274,931,115.12	94.57	95.73



BAB IV

(LKJiP) 2020



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini. Secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

Berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara masih tergolong dengan pencapaian yang rendah. Hal ini dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama rata-rata Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, yaitu sebesar **16,27%**, dengan pagu anggaran total **Rp. 457.101.424.879,47 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen)** dengan realiasi **94,57%**.

B. Hasil Analisis Berupa Permasalahan yang Dihadapi Tahun 2020

Beberapa indikator kinerja masih belum mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja. Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi diuraikan sebagai berikut :

- a. Proses tender berjalan lama sehingga waktu pengerjaan menjadi berkurang;
- b. Cuaca yang tidak mendukung menyebabkan pekerjaan di lapangan menjadi terhambat dan tidak tepat waktu;
- c. Penyedia jasa kurang baik dalam mengatur waktu pekerjaan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan;
- d. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM;

- e. Adanya wabah pandemi yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan di lapangan karena penyesuaian pola kebiasaan normal baru;
- f. Refocusing anggaran yang menyebabkan perubahan rencana kerja tahun anggaran berjalan; dan
- g. Belum optimalnya koordinasi antar *stakeholder*.

C. Langkah-Langkah yang Akan dilakukan di Tahun Berikutnya Untuk Mengatasi Hambatan

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara terhadap kendala yang dihadapi tahun 2019, dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan OPD atau *Stakeholder* terkait proses tender kegiatan sehingga pekerjaan berjalan sesuai rencana;
- b. Menyusun program prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada;
- c. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d. Sinkronisasi data pada rencana tahunan dinas yang dilaksanakan, sehingga program/kegiatan mendukung rencana rencana tahunan dinas;
- e. Melakukan monitoring dan koordinasi dengan pihak penyedia jasa agar bisa memanajemenkan waktu yang baik untuk menghindari masalah-masalah di lapangan;
- f. Perencanaan kinerja dan penganggaran dilakukan secara baik, sehingga tidak ada lagi penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKA dan DPA) yang berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ini dibuat sebagai bentuk dari transparansi terhadap masyarakat. Semoga LKJIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan



kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara di tahun selanjutnya.



g. **Lampiran**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Realisasi Anggaran
- 3) Foto Penghargaan
- 4) Dokumentasi Kegiatan

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PERUBAHAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN : 2020
LAPORAN BULANAN : S.D DESEMBER
UNIT ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,910,248,572	1.07	100.00	1.07	4,765,603,857	97.05	1.04	144,644,715
5.1.1	Belanja Pegawai	4,910,248,572	1.07	100.00	1.07	4,765,603,857	97.05	1.04	144,644,715
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	271,614,790	0.06	100.00	0.06	263,077,602	96.86	0.06	8,537,188
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4,638,633,782	1.01	100.00	1.01	4,502,526,255	97.07	0.99	136,107,527
	BELANJA LANGSUNG	452,191,176,307	98.93	95.68	94.65	427,509,327,258	94.54	93.53	24,681,849,049
1.03 . 1.03.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12,902,304,696	2.82	90.43	2.55	11,357,020,619	88.02	2.48	1,545,284,077
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 01	penyediaan jasa surat menyurat	7,000,000	0.00	100.00	0.00	6,900,000	98.57	0.00	100,000
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 02	penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	924,000,000	0.20	100.00	0.20	862,881,692	93.39	0.19	61,118,308
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 07	penyediaan jasa administrasi keuangan	7,516,521,696	1.64	84.01	1.38	6,245,823,600	83.09	1.37	1,270,698,096
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 08	penyediaan jasa kebersihan kantor	1,022,550,000	0.22	100.00	0.22	949,144,000	92.82	0.21	73,406,000
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	304,400,000	0.07	96.45	0.06	263,862,500	86.68	0.06	40,537,500
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 10	penyediaan alat tulis kantor	350,000,000	0.08	100.00	0.08	349,509,000	99.86	0.08	491,000
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 11	penyediaan barang cetakan dan pengadaan	129,593,000	0.03	96.99	0.03	122,751,605	94.72	0.03	6,841,395
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 12	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40,000,000	0.01	100.00	0.01	39,996,000	99.99	0.01	4,000
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 13	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	451,000,000	0.10	100.00	0.10	417,740,480	92.63	0.09	33,259,520
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	61,340,000	0.01	92.19	0.01	53,350,000	86.97	0.01	7,990,000
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 17	penyediaan makanan dan minuman	160,500,000	0.04	91.82	0.03	123,640,000	77.03	0.03	36,860,000
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 18	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	956,400,000	0.21	100.00	0.21	945,354,184	98.85	0.21	11,045,816
1.03 . 1.03.01.01 . 01 . 19	rapat-rapat koordinasi,pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	979,000,000	0.21	100.00	0.21	976,067,558	99.70	0.21	2,932,442
1.03 . 1.03.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	229,227,388,312	50.15	92.58	46.43	210,160,163,460	91.68	45.98	19,067,224,852
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 03	Pembangunan Gedung Kantor	117,017,343,269	25.60	100.00	25.60	116,437,882,798	99.50	25.47	579,460,471
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 12	Pembangunan Gedung Kantor SKPD	36,491,700,374	7.98	100.00	7.98	35,196,556,000	96.45	7.70	1,295,144,374
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 13	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum	3,590,283,000	0.79	100.00	0.79	3,556,700,000	99.06	0.78	33,583,000
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 15	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10,800,000	0.00	100.00	0.00	10,725,000	99.31	0.00	75,000
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	560,000,000	0.12	100.00	0.12	559,946,750	99.99	0.12	53,250
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2,347,500,000	0.51	99.93	0.51	2,343,942,255	99.85	0.51	3,557,745
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 47	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	69,091,261,669	15.12	75.39	11.40	52,013,683,595	75.28	11.38	17,077,578,074
1.03 . 1.03.01.01 . 02 . 48	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	118,500,000	0.03	100.00	0.03	40,727,062	34.37	0.01	77,772,938
1.03 . 1.03.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000	0.01	80.00	0.01	16,341,544	54.47	0.00	13,658,456
1.03 . 1.03.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	30,000,000	0.01	80.00	0.01	16,341,544	54.47	0.00	13,658,456
1.03 . 1.03.01.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan*	117,561,374,000	25.72	99.93	25.70	117,372,550,282	99.84	25.68	188,823,718
1.03 . 1.03.01.01 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	117,561,374,000	25.72	99.93	25.70	117,372,550,282	99.84	25.68	188,823,718
1.03 . 1.03.01.01 . 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong*	1,012,322,000	0.22	98.96	0.22	967,497,000	95.57	0.21	44,825,000
1.03 . 1.03.01.01 . 16 . 03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1,012,322,000	0.22	98.96	0.22	967,497,000	95.57	0.21	44,825,000
1.03 . 1.03.01.01 . 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan*	22,451,943,000	4.91	99.97	4.91	22,427,918,899	99.89	4.91	24,024,101
1.03 . 1.03.01.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	22,451,943,000	4.91	99.97	4.91	22,427,918,899	99.89	4.91	24,024,101
1.03 . 1.03.01.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Penga	1,824,929,852	0.40	78.12	0.31	1,385,863,261	75.94	0.30	439,066,591
1.03 . 1.03.01.01 . 24 . 01	Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi	351,850,000	0.08	85.22	0.07	289,815,000	82.37	0.06	62,035,000
1.03 . 1.03.01.01 . 24 . 26	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	98,290,852	0.02	100.00	0.02	98,290,852	100.00	0.02	0
1.03 . 1.03.01.01 . 24 . 33	O/P Jaringan, Bangunan Irigasi di Provinsi Kaltara	1,374,789,000	0.30	74.73	0.22	997,757,409	72.58	0.22	377,031,591
1.03 . 1.03.01.01 . 26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Da	3,989,044,952	0.87	97.92	0.85	3,730,824,023	93.53	0.82	258,220,929

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
1.03 . 1.03.01.01 . 26 . 01	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	16,440,000	0.00	100.00	0.00	16,440,000	100.00	0.00	0
1.03 . 1.03.01.01 . 26 . 11	Pengelolaan Sungai	3,972,604,952	0.87	97.91	0.85	3,714,384,023	93.50	0.81	258,220,929
1.03 . 1.03.01.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah*	4,514,342,000	0.99	100.00	0.99	4,423,055,640	97.98	0.97	91,286,360
1.03 . 1.03.01.01 . 27 . 02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	77,600,000	0.02	100.00	0.02	53,938,040	69.51	0.01	23,661,960
1.03 . 1.03.01.01 . 27 . 06	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	4,436,742,000	0.97	100.00	0.97	4,369,117,600	98.48	0.96	67,624,400
1.03 . 1.03.01.01 . 28	Program Pengendalian Banjir**	13,750,055,000	3.01	99.49	2.99	13,138,371,240	95.55	2.87	611,683,760
1.03 . 1.03.01.01 . 28 . 17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir	13,750,055,000	3.01	99.49	2.99	13,138,371,240	95.55	2.87	611,683,760
1.03 . 1.03.01.01 . 35	Program Perencanaan Tata Ruang*	2,681,000,000	0.59	86.01	0.50	1,443,225,244	53.83	0.32	1,237,774,756
1.03 . 1.03.01.01 . 35 . 03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	30,000,000	0.01	66.67	0.00	15,085,000	50.28	0.00	14,915,000
1.03 . 1.03.01.01 . 35 . 05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	940,500,000	0.21	87.93	0.18	800,579,544	85.12	0.18	139,920,456
1.03 . 1.03.01.01 . 35 . 10	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	1,710,500,000	0.37	85.30	0.32	627,560,700	36.69	0.14	1,082,939,300
1.03 . 1.03.01.01 . 37	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	170,500,000	0.04	87.98	0.03	114,440,921	67.12	0.03	56,059,079
1.03 . 1.03.01.01 . 37 . 01	Penyusunan Norma Standar dan Kriteria pengendalian pemanfaatan ruang	170,500,000	0.04	87.98	0.03	114,440,921	67.12	0.03	56,059,079
1.03 . 1.03.01.01 . 42	Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi	127,800,000	0.03	96.80	0.03	108,066,167	84.56	0.02	19,733,833
1.03 . 1.03.01.01 . 42 . 01	Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi	127,800,000	0.03	96.80	0.03	108,066,167	84.56	0.02	19,733,833
1.03 . 1.03.01.01 . 43	Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	1,184,500,000	0.26	80.93	0.21	1,015,677,995	85.75	0.22	168,822,005
1.03 . 1.03.01.01 . 43 . 01	Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi	1,052,100,000	0.23	80.56	0.19	906,270,512	86.14	0.20	145,829,488
1.03 . 1.03.01.01 . 43 . 02	Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi	132,400,000	0.03	83.91	0.02	109,407,483	82.63	0.02	22,992,517
1.03 . 1.03.01.01 . 45	Program Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM**	555,000,000	0.12	100.00	0.12	545,678,000	98.32	0.12	9,322,000
1.03 . 1.03.01.01 . 45 . 02	Penyusunan sistem informasi DPU	25,000,000	0.01	100.00	0.01	24,750,000	99.00	0.01	250,000
1.03 . 1.03.01.01 . 45 . 03	Penyusunan program dan monitoring kegiatan ke PU an	530,000,000	0.12	100.00	0.12	520,928,000	98.29	0.11	9,072,000
1.03 . 1.03.01.01 . 46	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	215,000,000	0.05	100.00	0.05	188,544,122	87.69	0.04	26,455,878
1.03 . 1.03.01.01 . 46 . 01	Catur tertib administrasi pertanahan	215,000,000	0.05	100.00	0.05	188,544,122	87.69	0.04	26,455,878
1.04 . 1.03.01.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan*	26,751,433,320	5.85	99.97	5.85	26,295,946,341	98.30	5.75	455,486,979
1.04 . 1.03.01.01 . 15 . 01	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	605,045,820	0.13	100.00	0.13	535,070,418	88.43	0.12	69,975,402
1.04 . 1.03.01.01 . 15 . 06	Stimulasi pembangunan Perumahan Masyarakat	1,043,075,000	0.23	100.00	0.23	950,483,500	91.12	0.21	92,591,500
1.04 . 1.03.01.01 . 15 . 07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	25,014,612,500	5.47	99.96	5.47	24,724,834,194	98.84	5.41	289,778,306
1.04 . 1.03.01.01 . 15 . 09	Pembangunan Rumah Layak Huni	88,700,000	0.02	100.00	0.02	85,558,229	96.46	0.02	3,141,771
1.04 . 1.03.01.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan*	179,900,000	0.04	100.00	0.04	129,446,500	71.95	0.03	50,453,500
1.04 . 1.03.01.01 . 16 . 02	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	179,900,000	0.04	100.00	0.04	129,446,500	71.95	0.03	50,453,500
1.04 . 1.03.01.01 . 21	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman*	13,062,339,175	2.86	100.00	2.86	12,688,696,000	97.14	2.78	373,643,175
1.04 . 1.03.01.01 . 21 . 02	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	11,094,682,175	2.43	100.00	2.43	10,769,652,000	97.07	2.36	325,030,175
1.04 . 1.03.01.01 . 21 . 03	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan	1,967,657,000	0.43	100.00	0.43	1,919,044,000	97.53	0.42	48,613,000
JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER		457,101,424,879	100.00	95.73	95.73	432,274,931,115	94.57	94.57	24,826,493,764



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sunardi, ST., MT**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. H. Irianto Lambrie**

Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, 31 Januari 2020

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Utara,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman,



SUNARDI, ST., MT
NIP. 19620906 199303 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	70%
2	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak	Persentase luasan permukiman layak huni	30%
3	Meningkatnya kualitas sumber daya jasa konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang profesional	50%
4	Mewujudkan infrastruktur Sumber Daya Air yang berkualitas	Rasio Jaringan Irigasi	15%
		Rasio wilayah rawan banjir	11%
		Persentase Ketersediaan sarana prasarana air baku	12%
5	Meningkatkan pembangunan rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	32%
6	Meningkatnya Pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya RTRW	Persentase masyarakat yang paham dan sadar pentingnya RTRW	45%
7	Meningkatnya kualitas dan panjang jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	65%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 135.286.786.000,00	APBD
2.	Pengembangan Perumahan	Rp 31.765.500.000,00	APBD
3.	Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 292.200.000,00	APBD
4.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp 565.050.000,00	APBD
5.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 24.792.450.000,00	APBD
6.	Pembinaan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman	Rp 12.663.814.350,00	APBD
7.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp 8.596.700.000,00	APBD
8.	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Lainnya	Rp 5.312.200.000,00	APBD
9.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan	Rp 5.499.950.000,00	APBD

Air Limbah

10.	Pengendalian Banjir	Rp	15.460.588.894,00	APBD
11.	Perencanaan Tata Ruang	Rp	2.495.200.000,00	APBD
12.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp	335.500.000,00	APBD
13.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Kontruksi	Rp	3.378.900.000,00	APBD
14.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Rp	306.000.000,00	APBD
Cakupan Provinsi				
15.	Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM	Rp	645.000.000,00	APBD
16.	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	Rp	435.250.000,00	APBD
Pemanfaatan Tanah				
JUMLAH		Rp	470.490.184.102,00	

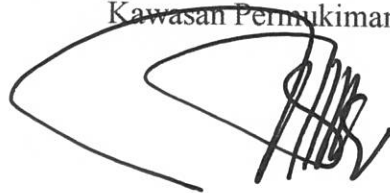
Tanjung Selor, 31 Januari 2020

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Utara,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman,



SUNARDI, ST., M.T
NIP. 19620906 199303 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sunardi, ST., MT**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. H. Irianto Lambrie**

Jabatan : Gubernur Kalimantan Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, 2 Maret 2020

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Utara,

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman,

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

SUNARDI, ST., MT
NIP. 19620906 199303 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	70%
2	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak	Persentase luasan permukiman layak huni	30%
3	Meningkatnya kualitas sumber daya jasa konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang profesional	50%
4	Mewujudkan infrastruktur Sumber Daya Air yang berkualitas	Rasio Jaringan Irigasi	15%
		Rasio wilayah rawan banjir	11%
		Persentase Ketersediaan sarana prasarana air baku	12%
5	Meningkatkan pembangunan rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	32%
6	Meningkatnya Pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya RTRW	Persentase masyarakat yang paham dan sadar pentingnya RTRW	45%
7	Meningkatnya kualitas dan panjang jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	65%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 135.286.786.000,00	APBD
2.	Pengembangan Perumahan	Rp 31.765.500.000,00	APBD
3.	Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 292.200.000,00	APBD
4.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp 565.050.000,00	APBD
5.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 24.792.450.000,00	APBD
6.	Pembinaan dan pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman	Rp 12.663.814.350,00	APBD
7.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp 8.596.700.000,00	APBD
8.	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Lainnya	Rp 5.312.200.000,00	APBD
9.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan	Rp 5.499.950.000,00	APBD

Air Limbah

10.	Pengendalian Banjir	Rp	15.460.588.894,00	APBD
11.	Perencanaan Tata Ruang	Rp	2.495.200.000,00	APBD
12.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp	335.500.000,00	APBD
13.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Kontruksi	Rp	3.378.900.000,00	APBD
14.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Rp	306.000.000,00	APBD
Cakupan Provinsi				
15.	Sistem Informasi Dinas PUPR-PERKIM	Rp	645.000.000,00	APBD
16.	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	435.250.000,00	APBD
JUMLAH		Rp	470.490.184.102,00	

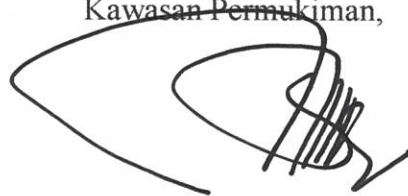
Tanjung Selor, 2 Maret 2020

Pihak Kedua
Gubernur Kalimantan Utara,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman,



SUNARDI, ST., M.T
NIP. 19620906 199303 1 003

FOTO PENGHARGAAN





DOKUMENTASI KEGIATAN

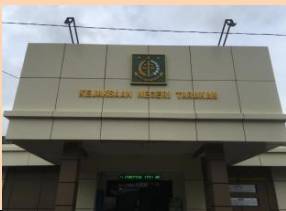
DOKUMENTASI BIDANG BINA MARGA

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		KETERANGAN
1	Pembangunan Jalan Menuju Bapelkes Tanjung Selor			
2	Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Nunukan Ruas Jalan Mamolo - Sei. Mengkadu - Sei. Banjar			

DOKUMENTASI BIDANG CIPTA KARYA

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		KETERANGAN
1	Pembangunan Gedung Badan Intelijen Negara (BIN)			
2	Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulungan Tahap V			
3	Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulungan Tahap VI			



4	Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tarakan			
5.	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Tanjung Rumbia Kabupaten Bulungan			
6.	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Tanjung Rumbia Kabupaten Bulungan Tahap III			
7.	Pembangunan Jalan Lingkungan Gedung Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara			
8.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Tanjung Buka Tahap II			
9.	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara Tahap II			

DOKUMENTASI BIDANG SUMBER DAYA AIR

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		KETERANGAN
1.	Pembangunan Kanal Pengendali Banjir Tanjung Selor Tahap V			

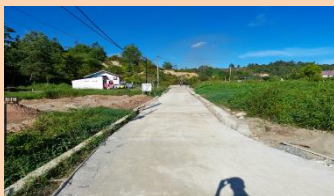


2.	Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Tahap V			
----	--	---	--	--

DOKUMENTASI BIDANG SUMBER PERUMAHAN

No.	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		KETERANGAN
3.	Peningkatan Jalan Lingkungan KORPRI Tanjung Selor			
4.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kab. Bulungan (Ruas 1) Peningkatan Jalan Haji Sugeng Kab. Bulungan			
5.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 30 Karang Anyar Pantai, Tarakan			
6.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Semenisasi Jalan			



	Mulawarman Gg. Sulawesi RT. 53 Karang Anyar, Tarakan			
7.	Pembanguna n/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Drainase Jl. Anggrek Ujung Rt. 15 Kelurahan Karang Anyar			
8.	Pembanguna n/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Peningkatan Jalan RT. 06 Gang Mangga Dua Kampung Empat Tarakan			
9.	Pembanguna n/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Peningkatan Jl. Lingkungan Dan Siring Gg. Jeruk Juata Kerikil			
10.	Pembanguna n/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Peningkatan Jalan Dan Drainase Gang Sengon RT. 18			



	Kampung Satu Tarakan			
11.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Semenisasi Jalan Aki Balak Gang Pondok Daud, Tarakan			
12.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Semenisasi RT. 01 Gunung Lingkas, Tarakan			
13.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Semenisasi Gang Nurhidayah RT. 02 Juata Permai, Tarakan			
14.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Semenisasi Jalan Bakarui RT. 01 Kel. Karang Harapan, Tarakan			



15.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Semenisasi Gang Swadaya Rt. 01 Juata Kerikil, Tarakan			
16.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Peningkatan Jalan Dan Jembatan RT.20 Kampung Satu, Tarakan			
17.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (21 Ruas) - Semenisasi Jalan Bhayangkara Gang Mawar, Rt. 64, Kel. Karang Anyar Pantai Tarakan			
18.	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 1) - Peningkatan Jalan Bersama I RT.45 Pasir Putih Kelurahan			



	Karang Anyar Tarakan			
19.	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 2) - Semenisasi Jalan Sungai Bengawan Gang Perumahan TKBM Tarakan			
20.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 4) - Semenisasi Jalan dan Drainase RT. 20 Kampung Satu Skip, Tarakan			
21.	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 5) - Peningkatan jalan lingkungan gang Rimba Raya Karang Harapan, Tarakan			
22.	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 7) -			



	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Aghatis 3 dan 4 RT.05 Karang Harapan Tarakan			
23.	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 9) - Pembangunan siring RT.26 Karang Anyar Tarakan			
24.	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 11) - Peningkatan Jalan Lingkungan dan Jembatan RT. 12 Pantai Amal Tarakan			
25.	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 13) - Peningkatan Siring dan Jembatan RT. 16 Karang Harapan Tarakan			
26.	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 15) -			



	Peningkatan Jalan/Jembatan Kayu RT.7 Jalan Tembung Juata Laut Tarakan			
27.	Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kota Tarakan (Ruas 18) - Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Anggrek 3 RT.15 Karang Anyar Tarakan			

DOKUMENTASI BIDANG SUMBER TATA RUANG

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI KEGIATAN		KETERANGAN
1	Pekerjaan Konsultasi Proses legalisasi perda RTR Kawasan Strategis Provinsi KIPi Mangkupadi Tanah Kuning Kab. Bulungan			
2	Pekerjaan Konsultasi Konsultan Pendamping Alih Fungsi Lahan (Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan) Provinsi Kalimantan Utara			

